



LAPORAN KEUANGAN

BPPK

TAHUN 2024 *AUDITED*

www.bppk.kemenkeu.go.id
Jalan Purnawarman No 99,
Jakarta

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jalan Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru
Jakarta



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan



Ditandatangani secara elektronik

Andin Hadiyanto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xii
RINGKASAN DAN <i>FACE</i> LAPORAN KEUANGAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
NERACA.....	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. <i>PENJELASAN UMUM</i>	10
B. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN</i>	28
C. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</i>	66
D. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL</i>	92
E. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</i>	104
F. <i>CATATAN PENTING LAINNYA</i>	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1	15
Tabel 2 Ketentuan Perhitungan Penyisihan Piutang	19
Tabel 3 Masa Manfaat ATB	24
Tabel 4 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPK Tahun 2024	28
Tabel 5 Revisi Anggaran Belanja BPPK Tahun 2024 per Kegiatan	28
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	36
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023	43
Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per Satuan Kerja	44
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja	45
Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana	45
Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Program/Fungsi/Kegiatan Tahun 2024	46
Tabel 12 Pagu dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Tahun 2024	48
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023	49
Tabel 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024	50
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023	51
Tabel 16 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024	54
Tabel 17 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023	55
Tabel 18 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024	56
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023	56
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023	58
Tabel 21 Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	59
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023	61
Tabel 23 Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	61
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023	62
Tabel 25 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 (Aset Tetap Lainnya)	62
Tabel 26 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 (Aset Tak Berwujud)	63
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja BLU Tahun 2024 dan Tahun 2023	63
Tabel 24 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024	66
Tabel 25 Rincian Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) per 31 Desember 2024	67
Tabel 26 Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024	68
Tabel 26 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024	68
Tabel 27 Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024	71
Tabel 28 Rincian Debitur Mahasiswa Prodi I OC PBB	71

Tabel 30 Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024	72
Tabel 31 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2024	73
Tabel 32 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	73
Tabel 33 Mutasi Nilai Persediaan	74
Tabel 34 Mutasi Nilai Tanah	74
Tabel 35 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin.....	76
Tabel 36 Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	78
Tabel 37 Mutasi Aset Tetap Lainnya	80
Tabel 38 Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	81
Tabel 37 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	82
Tabel 40 Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	82
Tabel 39 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR 31 Desember 2024.....	83
Tabel 40 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR.....	85
Tabel 41 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024.....	85
Tabel 42 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	86
Tabel 45 Mutasi Aset Tak Berwujud	87
Tabel 46 Mutasi Saldo Dana di Rekening Penampungan.....	87
Tabel 44 Mutasi Nilai Aset Lain-lain.....	88
Tabel 45 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	89
Tabel 46 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024.....	89
Tabel 48 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024.....	90
Tabel 52 Perbandingan Rincian PNBPN 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	92
Tabel 50 Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 .	94
Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	95
Tabel 52 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	95
Tabel 53 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	97
Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	98
Tabel 55 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	99
Tabel 56 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	100
Tabel 57 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	101

Tabel 58 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2024	105
Tabel 59 Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember 2024	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPPK Per 31 Desember 2024	37
Gambar 2 Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2024	45
Gambar 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana Tahun 2024	46
Gambar 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum Per Kegiatan Tahun 2024	47
Gambar 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan per Kegiatan Tahun 2024	47
Gambar 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	50



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

GEDUNG ARIMURTI LANTAI 2 JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON (021) 7394666 7260451 EXT. 621; FAKSIMILE (021) 7244912; SITUS: WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto



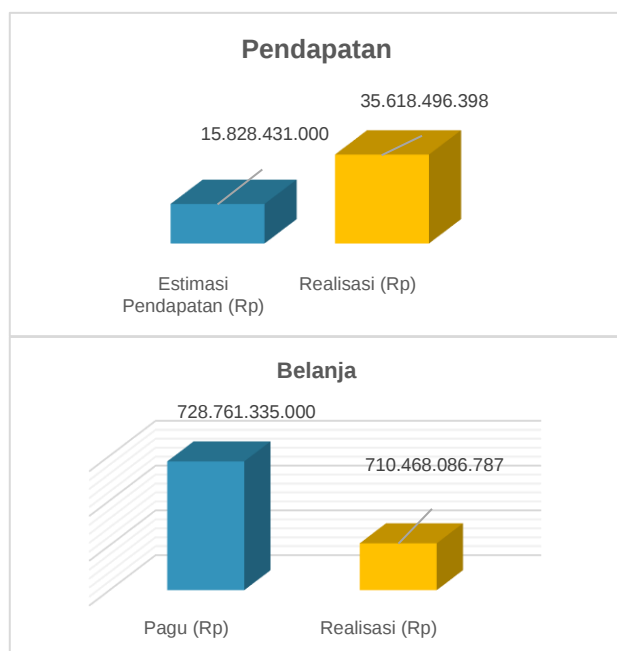
RINGKASAN DAN *FACE* LAPORAN KEUANGAN



Laporan Keuangan BPPK TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara mencapai 225,03% dan realisasi Belanja Negara mencapai 97,49%.



B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Aset Lancar	147.979.217.661	138.041.564.673	7,20
Aset Tetap	7.262.992.263.931	7.017.633.837.944	3,50
Piutang Jk Panjang	0	0	-
Aset Lainnya	30.744.714.473	4.873.437.368	530,86
Total Aset	7.441.716.196.065	7.160.548.839.985	3,93
Kewajiban	31.678.012.608	2.859.013.911	1.008,00
Ekuitas	7.410.038.183.457	7.157.689.826.074	3,53
Total Kewajiban & Ekuitas	7.411.716.196.065	7.160.548.839.985	3,93

C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO beban surplus/defisit dari operasi surplus/defisit dari kegiatan non-operasional surplus/defisit sebelum pos luar biasa pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

(Dalam Rupiah)	
Pendapatan Operasional	29.669.765.550
Beban Operasional	461.689.425.379
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	2.064.581.616
Defisit-LO	(429.955.078.213)

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

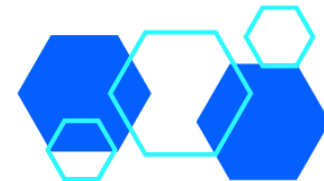
(Dalam Rupiah)	
Ekuitas 1 Januari 2024	7.157.689.826.074
Defisit LO	(429.955.078.213)
Koreksi	2.309.737.134
Lain-lain	1.919.004.719
Transaksi Antar Entitas	679.993.698.462
Ekuitas 31 Desember 2024	7.410.038.183.457

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran

BPPK TA 2024



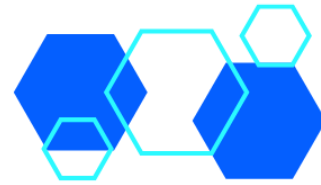
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% thd Angg	31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	15.828.431.000	35.618.496.398	225,03	22.744.004.746
JUMLAH PENDAPATAN		15.828.431.000	35.618.496.398	225,03	22.744.004.746
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	10.874.426.000	9.661.431.780	88,85	9.517.666.400
Belanja Barang	B.4	392.532.393.000	377.207.846.742	96,10	353.648.825.777
Jumlah Belanja Operasi		403.406.819.000	386.869.278.522	95,90	363.166.492.177
Belanja Modal	B.5				
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.1	47.622.482.000	47.508.742.419	99,76	26.928.867.261
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.2	273.745.588.000	272.201.870.325	99,44	24.095.970.118
Belanja Modal Lainnya	B.5.3	56.175.000	53.924.205	95,99	1.936.996.876
Belanja Modal BLU		3.930.271.000	3.834.271.316	97,56	4.960.871.059
Jumlah Belanja Modal		325.354.516.000	323.598.808.265	99,46	57.922.705.314
JUMLAH BELANJA		728.761.335.000	710.468.086.787	97,49	421.089.197.491

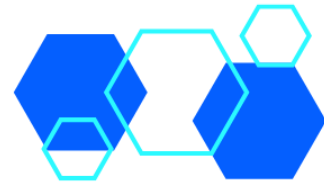


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1	91.883.693.150	133.961.168.746	(42.077.475.596)	(31,41)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.2	52.000.000.000	-	52.000.000.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	24.808.463	-	24.808.463	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	726.497.942	557.592.506	168.905.436	30,29
Piutang Bukan Pajak	C.5	732.405.591	719.844.557	12.561.034	1,74
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(691.548.582)	(691.485.777)	(62.805)	0,01
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		40.857.009	28.358.780	12.498.229	44,07
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.6	702.507.788	353.337.500	349.170.288	98,82
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.8	(525.126.529)	(202.017.900)	(323.108.629)	159,94
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		177.381.259	151.319.600	26.061.659	17,22
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.7	286.664.703	286.664.703	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.8	(286.664.703)	(286.664.703)	-	-
Persediaan	C.9	3.125.979.838	3.343.125.041	(217.145.203)	(6,50)
JUMLAH ASET LANCAR		147.979.217.661	138.041.564.673	9.937.652.988	7,20
ASET TETAP					
Tanah	C.10	5.869.685.586.420	5.872.378.852.000	(2.693.265.580)	(0,05)
Peralatan dan Mesin	C.11	457.979.790.555	423.594.922.495	34.384.868.060	8,12
Gedung dan Bangunan	C.12	1.442.091.147.824	1.271.841.746.848	170.249.400.976	13,39
Aset Tetap Lainnya	C.13	9.460.577.055	9.982.747.879	(522.170.824)	(5,23)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	113.339.708.331	12.315.575.728	101.024.132.603	820,30
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.15	(629.564.546.254)	(572.480.007.006)	(57.084.539.248)	9,97
JUMLAH ASET TETAP		7.262.992.263.931	7.017.633.837.944	245.358.425.987	3,50
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	1.563.832.241	1.502.085.261	61.746.980	4,11
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	(1.563.832.241)	(1.502.085.261)	(61.746.980)	4,11
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.18	925.823.061	925.823.061	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.19	(925.823.061)	(925.823.061)	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-	-	0,00

Lanjut...

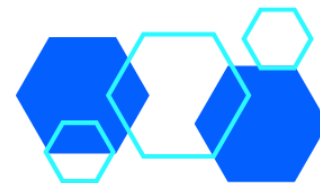


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

... lanjutan

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CAT ATA N	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.20	9.985.336.477	10.022.176.354	(36.839.877)	(0,37)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	28.784.378.176	1.508.925.644	27.275.452.532	1.807,61
Aset Lain-lain	C.22	3.110.347.168	12.109.451.354	(8.999.104.186)	(74,31)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.23	(11.135.347.348)	(18.767.115.984)	7.631.768.636	(40,67)
JUMLAH ASET LAINNYA		30.744.714.473	4.873.437.368	25.871.277.105	530,86
JUMLAH ASET		7.441.716.196.065	7.160.548.839.985	281.167.356.080	3,93
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	29.907.874.484	2.538.012.380	27.369.862.104	1.078,40
Pendapatan Diterima Di Muka	C.25	1.770.138.124	321.001.531	1.449.136.593	451,44
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		31.678.012.608	2.859.013.911	28.818.998.697	1.008,00
JUMLAH KEWAJIBAN		31.678.012.608	2.859.013.911	28.818.998.697	1.008,00
EKUITAS					
Ekuitas	C.26	7.410.038.183.457	7.157.689.826.074	252.348.357.383	3,53
JUMLAH EKUITAS		7.410.038.183.457	7.157.689.826.074	252.348.357.383	3,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.441.716.196.065	7.160.548.839.985	281.167.356.080	3,93



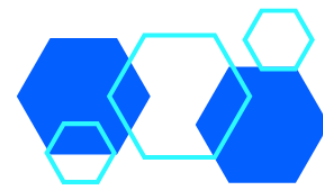
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	29.669.765.550	21.112.420.317
JUMLAH PENDAPATAN			29.669.765.550	21.112.420.317
BEBAN				
	Beban Pegawai	D.2	11.419.351.780	11.037.342.900
	Beban Persediaan	D.3	5.471.380.746	6.224.486.564
	Beban Barang dan Jasa	D.4	312.839.813.341	292.370.472.835
	Beban Pemeliharaan	D.5	34.660.822.426	28.118.624.417
	Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.163.693.611	25.971.670.775
	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
	Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	74.749.445.061	74.581.544.266
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	384.918.414	(12.378.625)
	Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN			461.689.425.379	461.772.927.948
	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(432.019.659.829)	(417.179.342.815)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		D.11		
	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		1.959.726.572	(150.357.972)
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3.002.075.401	1.898.388.733
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.042.348.829	2.048.746.705
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		104.855.044	(20.233.572)
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		231.833.777	160.722.974
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		126.978.733	180.956.546
	SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.064.581.616	(170.591.544)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(429.955.078.213)	(417.349.934.359)
POS LUAR BIASA		D.12		
	Pendapatan PNB		-	-
	Beban Perjalanan Dinas		-	-
	Beban Persediaan		-	-
	SURPLUS/DEFISIT LO		(429.955.078.213)	(417.349.934.359)



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Ekuitas Awal	E.1	7.157.689.826.074	7.177.140.299.363
Surplus/Defisit LO	E.2	(429.955.078.213)	(417.349.934.359)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	2.309.737.134	(31.641.991)
- Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
- Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	48.139.415
- Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	11.169.000
- Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
- Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	390.732.415	(90.950.406)
Lain-lain	E.4.6	1.919.004.719	-
Transaksi Antar Entitas	E.5	679.993.698.462	397.931.103.061
Kenaikan/Penurunan Entitas		252.348.357.383	(19.450.473.289)
Ekuitas Akhir	E.6	7.410.038.183.457	7.157.689.826.074

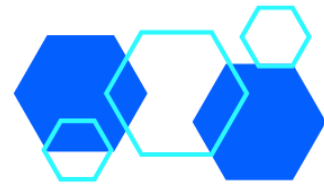


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



A. PENJELASAN UMUM



**A. PENJELASAN UMUM****A.1 Profil dan Kebijakan Teknis BPPK***Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan negara khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu **Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif Kompetitif Inklusif dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Salah satu kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada unit pengguna khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK.

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan diperlukan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas. Perubahan paradigma saat ini di mana sumber daya manusia adalah aset atau modal yang berharga dan perlu dikembangkan. BPPK tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tapi BPPK harus menjadi contoh pendidikan dan pelatihan yang mengembangkan modal manusia atau *human capital* tidak hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga pengembangan modal sumber daya manusia pengelola keuangan negara bagi Republik Indonesia. BPPK diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan menghadapi tantangan yang ada.

Visi BPPK disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan. Dengan visi yang baru BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020-2024 visi dan misi BPPK adalah sebagai berikut:

A.1.1 Visi BPPK

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Beretika.

A.1.2 Misi BPPK

1. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
2. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi pada SDM Keuangan Negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
3. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
4. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
5. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

A.1.3 Arah Kebijakan BPPK

Arah kebijakan BPPK pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan serta mencapai sasaran strategis organisasi BPPK adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan negara termasuk pada penguasaan teknologi informasi.
2. Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal.
3. Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara.
4. Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan.
5. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*.
7. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien.

A.1.4 Tugas Fungsi dan Peran BPPK

BPPK beralamat di Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
2. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
3. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik; dan
7. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

BPPK juga mempunyai Balai Diklat Keuangan yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Terdapat 11 (sebelas) Balai Diklat Keuangan dan 1 (satu) Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan telah dilakukan likuidasi pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari implementasi PMK nomor 79/PMK.01/2022 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan pemerintah pusat menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal

- Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPPK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang. SAI meliputi: transaksi BMN transaksi persediaan transaksi pembayaran transaksi anggaran transaksi realisasi transaksi akrual transaksi BLU dan transaksi lainnya. Untuk mendukung penerapan SAI berbasis akrual dan terintegrasi maka digunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Modul-modul dalam Aplikasi SAKTI terdiri dari: Modul Penganggaran Modul Komitmen Modul Pembayaran Modul Bendahara Modul Persediaan Modul Aset Tetap Modul Piutang dan Modul Pelaporan. Keseluruhan proses transaksi keuangan dan barang termuat pada Modul Pelaporan. Modul Pelaporan ini menghasilkan laporan-laporan di antaranya: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini merupakan laporan gabungan dari seluruh jenjang struktural di bawah BPPK yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi dalam lingkup BPPK pada akhir tahun 2024 adalah 13 (Tiga Belas) entitas. Rincian entitas akuntansi tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode	Uraian Wilayah	Jenis Kewenangan		Jumlah
			KP	KD	
1	0199	Sekretariat BPPK	1		1
2	0199	PKN STAN	1		1
3	0200	Prov. Jawa Barat		1	1
4	0400	Prov. DI Yogyakarta		1	1
5	0500	Prov. Jawa Timur		1	1
6	0700	Prov. Sumatra Utara		1	1
7	1100	Prov. Sumatra Selatan		1	1
8	1600	Prov. Kalimantan Timur		1	1
9	1700	Prov. Sulawesi Utara		1	1
10	1900	Prov. Sulawesi Selatan		1	1
11	2200	Prov. Bali		1	1
12	1351	Prov. Kalimantan Barat		1	1
13	0900	Prov. Riau		1	1
Jumlah			2	11	13

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

BPPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Keuangan. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah sebagai berikut:

A.5.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA

1. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

3. Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO

1. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan – LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Pendapatan yang berasal dari BLU PKN STAN diantaranya: Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang diakui setelah pengesahan BLU.
3. Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
5. Semua Pendapatan – LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi Pendapatan – LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belanja

A.5.3 Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

A.5.4 Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ✓ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Ketentuan mengenai perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Ketentuan Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

- ✓ harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus ketinggalan jaman tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - ✓ Tanah;

- ✓ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- ✓ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas dilakukan sebagai berikut:

Piutang Jangka Panjang

- ✓ Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- ✓ Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-lain.
- ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai ATB diakui jika dan hanya jika:
 - ✓ Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - ✓ Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.5.6 Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga Belanja yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Diterima di Muka Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.5.8 Amortisasi ATB

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas antara lain meliputi:

- a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- b. Lisensi;
- c. Waralaba (*Franchise*);
- d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
- e. Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- ATB yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan penghapusannya; dan

- ATB dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan pemindahtanganan pemusnahan atau penghapusan.

Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk ATB yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk ATB yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016 nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit ATB tanpa adanya nilai residu.

Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas ATB secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 masa manfaat Barang Milik Negara berupa ATB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Masa Manfaat ATB

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
8	01	01	01	026	Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000. 1 : 500.000 1 : 250.000)	20
8	01	01	01	027	Peta RBI Skala Menengah (1:100.000. 1 : 50.000 1 : 25.000)	10
8	01	01	01	028	Peta RBI Skala Besar (1:10.000. 1 : 5.000 1 : 2.500 1 : 1.000)	5
8	01	01	01	029	Peta LLN Skala Kecil (1 : 500.000 1 : 250.000)	20
8	01	01	01	030	Peta LLN Skala Menengah (1 : 50.000)	12
8	01	01	01	031	Peta LPI Skala Kecil (1 : 250.000)	20
8	01	01	01	032	Peta LPI Skala Menengah (1 : 50.000 1 : 25.000)	12
8	01	01	01	033	Peta LPI Skala Besar (1 : 10.000)	5
8	01	01	01	034	Peta Batas Wilayah Administrasi	10
8	01	01	01	035	Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
8	01	01	01	036	Peta Batas Negara	10
8	01	01	01	037	Data Pasang Surut	20
8	01	01	01	038	Data GNSS	20
8	01	01	01	039	Data Gaya Berat	20
8	01	01	01	040	Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
8	01	01	01	041	Citra Satelit Resolusi Tinggi	5
8	01	01	01	042	Citra Satelit Resolusi Sedang	10
8	01	01	01	043	Foto Udara	5
8	01	01	01	044	Peta Tematik Morfometri	5
8	01	01	01	045	Peta Tematik Penutup Lahan	5
8	01	01	01	046	Peta Tematik Sistem Lahan	5
8	01	01	01	047	Peta Tematik Lainnya	5
8	01	01	01	048	Atlas	10

A.5.9 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua keterbandingan

penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

A.6 Likuidasi Balai Diklat Kepemimpinan

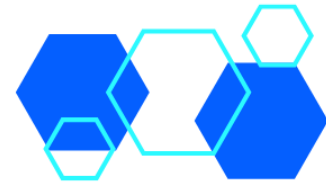
Likuidasi Balai Diklat Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat penataan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang kemudian dicabut melalui PMK 124 tahun 2024. Penataan organisasi ini meliputi perubahan Pusdiklat dan pencabutan sebagian PMK nomor 79/PMK.01/2022 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (pencabutan ketentuan yang terkait dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan). Sebagai tindak lanjut atas implementasi PMK tersebut diatas, kemudian dilakukan likuidasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dengan berpedoman pada PMK 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan likuidasi ini dimulai dari inventarisasi aset sampai dengan pemindahan (transfer) aset ke Sekretariat BPPK melalui mekanisme Likuidasi Keluar – Likuidasi Masuk (LKLM). Termasuk juga untuk sisa anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dilakukan pergeseran (revisi) ke Sekretariat BPPK



B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN





B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan BPPK melakukan revisi pagu anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja BPPK Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4 sedangkan revisi anggaran berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPK Tahun 2024

Uraian	Estimasi/ Anggaran Awal (Rp)	Tahun 2024 Estimasi/ Anggaran Setelah Direvisi (Rp)	Perubahan (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan BLU	11.467.000.000	13.967.000.000	2.500.000.000
PNBP Lainnya	1.861.431.000	1.861.431.000	-
Jumlah Pendapatan	13.328.431.000	15.828.431.000	2.500.000.000
Belanja			
Belanja Pegawai	10.798.478.000	10.874.426.000	75.948.000
Belanja Barang	381.624.233.000	392.532.393.000	10.908.160.000
Belanja Modal	298.031.662.000	325.354.516.000	27.322.854.000
Jumlah Belanja	690.454.373.000	728.761.335.000	38.306.962.000

Tabel 5 Revisi Anggaran Belanja BPPK Tahun 2024 per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Tahun 2024 Anggaran Setelah Direvisi (Rp)	Perubahan (Rp)
4678	Legislasi dan Litigasi	45.048.000	21.488.000	(23.560.000)
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	260.985.905.000	287.498.296.000	26.512.391.000
4681	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	621.974.000	150.114.687.000	149.492.713.000
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	234.180.130.000	1.043.056.000	(233.137.074.000)
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	114.213.000	545.934.000	431.721.000
4687	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	499.250.000	242.111.587.000	241.612.337.000
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	145.507.819.000	46.586.082.000	(98.921.737.000)
4682	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	845.934.000	190.558.000	(655.376.000)
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM	47.565.895.000	88.205.000	(47.477.690.000)
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	88.205.000	561.442.000	473.237.000
	JUMLAH	690.454.373.000	728.761.335.000	38.306.962.000

Estimasi Pendapatan di lingkup BPPK mengalami perubahan dari estimasi awal. Adapun estimasi pendapatan di lingkup BPPK adalah sebagai berikut.

1. Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp10.682.000.000 pada PKN STAN. Nilai estimasi pendapatan tersebut merupakan estimasi penerimaan yang berasal dari biaya pendaftaran USM PKN STAN layanan terjemah ijazah dan biaya pelatihan brevet pajak. Pada periode Triwulan IV terdapat penambahan target PNBP sebesar Rp2.500.000.000 yang merupakan penambahan belanja dalam ambang batas BLU.
2. Estimasi Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp3.060.000.000 pada PKN STAN. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan bunga deposito PKN STAN.
3. Estimasi Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp225.000.000 pada PKN STAN. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan sewa gedung BLU PKN STAN.
4. Estimasi Pendapatan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp3.000.000 pada Sekretariat BPPK. Estimasi ini berasal dari perkiraan penerimaan hasil lelang arsip inaktif.
5. Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp717.500.000 pada Sekretariat BPPK, BDK Makassar, BDK Medan, BDK Manado, dan BDK Pekanbaru. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan dari lelang penjualan aset tetap berupa peralatan dan mesin.
6. Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp36.104.000 pada Sekretariat BPPK, BDK Malang, BDK Balikpapan. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan dari lelang penjualan aset tetap.
7. Estimasi Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp79.827.000 pada Sekretariat BPPK, BDK Yogyakarta, BDK Palembang, BDK Cimahi, dan BDK Pekanbaru. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan dari sewa ruangan/gedung di lingkup BPPK.
8. Estimasi Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp1.025.000.000 pada Pusdiklat Bea dan Cukai. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan biaya pendaftaran ujian sertifikasi kepabeanan.

Pagu Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengalami pergeseran sepanjang Tahun 2024.

Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat revisi sebagai berikut:

1. Revisi DIPA 1.0 tanggal 30 Januari 2024 yang merupakan revisi kewenangan DJA. Revisi dilaksanakan melalui penetapan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) nomor S-102/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengesahan Revisi Anggaran dalam rangka Memenuhi

Kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2024 pada Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Angka *Automatic Adjustment* telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu untuk Sekretariat BPPK adalah sebesar Rp4.335.285.000,00 dan PKN STAN sebesar Rp4.488.280.000,00. Selain itu, BPPK juga melakukan revisi pergeseran anggaran antar Unit Eselon I dalam rangka penambahan anggaran *Transit Office* pada BDK Balikpapan, pergeseran anggaran dan volume output untuk Proyek Unggulan Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Revisi 3.0 tanggal 8 Maret 2024 yang merupakan revisi kewenangan DJA. Penetapan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) nomor S-209/AG/AG.3/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pengesahan Revisi Anggaran pada 4 (empat) Unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan TA 2024. Sesuai ND Kepala BPPK nomor ND-40/PP/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran Kewenangan DJA, dilakukan pergeseran anggaran antar-Unit Eselon I; antar jenis belanja; dan perubahan RPD pada Halaman III DIPA. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Pelatihan Teknis Kegiatan Penguatan Karakter pada BPPK (411868), pemenuhan kebutuhan belanja gaji PPPK pada PKN STAN (477198) dan penyesuaian belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja yang mendukung penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan organisasi.

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat revisi DIPA 5.3 tanggal 22 Mei 2024 yang merupakan revisi kewenangan DJA. Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-338/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-3). Substansi dari revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. distribusi anggaran dan output RO AKP Kewilayahan dari DIPA Satker BPPK (411868) ke 11 Balai Diklat Keuangan;
- b. distribusi anggaran dan output RO Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan – PU dari DIPA BPPK (411868) – Pusdiklat BC ke BDK Pekanbaru, BDK Yogyakarta dan BDK Denpasar;
- c. penyesuaian volume output di beberapa satker;
- d. pergeseran anggaran belanja barang operasional ke belanja barang non-operasional; serta
- e. pergeseran antar jenis belanja dan antarsatker.

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat beberapa kali revisi sebagai berikut.

1. Revisi DIPA 7.3 merupakan revisi kewenangan DJA yang ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-409/AG/AG.3/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-4). Revisi ini mencakup:
 - a. pembukaan blokir Halaman IV.A DIPA di BDK Pekanbaru sebesar Rp1.644.240.000 pada RO Gedung/Bangunan;
 - b. pendetailan RO Gedung/Bangunan dan Pemenuhan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Satker BPPK (411868);
 - c. pergeseran anggaran antar KRO dan antarjenis belanja.
2. Revisi DIPA 9.5 merupakan revisi kewenangan DJA yang ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-475/AG/AG.3/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-5). Revisi ini mencakup:
 - a. pembukaan *Automatic Adjustment* (blokir) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor ND-15/SJ/SJ.1/2024 tanggal 22 Juli 2024 hal Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian Keuangan TA 2024, menyampaikan bahwa terdapat persetujuan relaksasi blokir AA pada BPPK sebesar Rp6.764.565.000;
 - b. kebutuhan tambahan anggaran *Transit Office* Kementerian Keuangan di IKN terkait pekerjaan tambahan/penyempurnaan (diluar pekerjaan yang sudah dikontrakan) seperti renovasi rumah dinas yang akan digunakan oleh Menteri dan Eselon I, Pemasangan ACP, Perapihan Taman dan Pengecatan, Renovasi Aula dan Mushola dan lainnya sebesar Rp3.548.239.000;
 - c. kebutuhan tambahan anggaran pengisian peralatan/furniture dan penambahan PPNP pasca pembangunan gedung kantor dan asrama Balai Diklat Keuangan Denpasar;
 - d. pergeseran anggaran antar-unit Eselon I untuk penambahan kebutuhan anggaran tersebut pada DIPA BPPK sebesar Rp11.866.800.000;
 - e. pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat ke BDK Denpasar sebesar Rp2.276.285.000 dalam rangka memenuhi kebutuhan pengisian peralatan/furniture dan penambahan PPNP pasca pembangunan gedung kantor dan asrama Balai Diklat Keuangan Denpasar;
 - f. pergeseran anggaran antar-kegiatan pada BDK Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan dukungan kerumahtanggaan *transit office* sebesar Rp60.000.000;

- g. selain pergeseran anggaran tersebut, pada usulan revisi ini juga terdapat perubahan volume Rincian Output di beberapa satker.
3. Revisi DIPA 10.5 merupakan revisi kewenangan DJA yang ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-509/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Agustus 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-6). Revisi ini mencakup:
 - a. pergeseran anggaran antar satker dari Balai Diklat Kepemimpinan (411874) ke BPPK Pusat (411868) sebesar Rp2.369.536.000;
 - b. pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Denpasar (675741) dalam rangka pemenuhan peralatan/furniture pasca pembangunan Gedung Kantor dan Asrama sebesar Rp399.315.000;
 - c. pergeseran anggaran antar satker dari BDK Cimahi (622429) ke BDK Denpasar (675741) dalam rangka pemenuhan peralatan/furniture pasca pembangunan Gedung Kantor dan Asrama sebesar Rp976.970.000;
 - d. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja barang ekstrakomptabel pada RO Peralatan Fasilitas Perkantoran BPPK Pusat (411868) sebesar Rp42.886.000;
 - e. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja modal RO Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (PPDK) dari RO Kemenkeu Learning Center (KLC) pada BPPK Pusat (411868) sebesar Rp15.060.000;
 - f. pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan (pemanfaatan sisa anggaran kontraktual) dari RO Peralatan Fasilitas Perkantoran ke RO Pembelajaran Klasikal pada BDK Pekanbaru (675720) untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sebesar Rp73.443.000;
 - g. pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan pada BPPK Pusat (411868);
 - h. pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO Kendaraan Bermotor sebesar Rp198.845.000 dan RO Gedung/Bangunan sebesar Rp250.810.000 pada BPPK Pusat (411868) dalam rangka memenuhi kebutuhan RO Peralatan Fasilitas Perkantoran; penambahan pagu dan penambahan detail pekerjaan pada RO Gedung/Bangunan.
4. Revisi DIPA 11.5 merupakan revisi kewenangan DJA yang ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-583/AG/AG.3/2024 tanggal 17 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-6). Revisi ini mencakup:

- a. kebutuhan tambahan anggaran Pelatihan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) pada DIPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp4.846.411.000 yang dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari DIPA Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat ke setiap satker Balai Diklat Keuangan dalam rangka distribusi Rincian Output (RO) Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit sebagai implementasi tagging RO SBKU sebesar Rp55.000.000;
- c. pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat ke Balai Diklat Keuangan Medan dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pelatihan hasil AKP kewilayahan sebesar Rp345.307.000;
- d. pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat ke Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan penunjang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXII sebesar Rp63.141.000;
- e. pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan;
- f. perubahan volume Rincian Output di seluruh satker.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat beberapa kali revisi berikut ini.

1. Revisi DIPA 12.6 tanggal 11 Oktober 2024 yang merupakan Revisi Kewenangan DJA terutama terkait dengan penambahan anggaran Karyasiswa dari Sekretariat Jenderal. Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-659/AG/AG.3/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-8). Adapun revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. terdapat kebutuhan tambahan anggaran Karyasiswa Beasiswa dan Pelatihan RSPP pada DIPA Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp6.016.039.000,00 yang dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari DIPA Sekretariat Jenderal;
 - b. terdapat pergeseran anggaran antar-RO/KRO antar-kegiatan pada lingkup BPPK sebagai berikut:
 - 1) pada BPPK Pusat (411868), pergeseran ke RO Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit sebesar Rp64.610.000,00, RO Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi sebesar Rp47.710.000,00 dan RO Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar

- Rp15.410.000 yang berasal dari RO Rekomendasi Perencanaan Pelatihan sebesar total Rp127.730.000,00 untuk memenuhi kegiatan Penyusunan Renstra BPPK 2025-2029, kegiatan Evaluasi Program Legislasi 2024 dan Identifikasi Legislasi 2025, serta kegiatan Finalisasi Pedoman Penjaminan Mutu Pembelajaran;
- 2) pada BPPK Pusat (411868), pemenuhan RO Sertifikasi Kompetensi dan RO Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Pusdiklat AP yang diambil dari RO Manajemen Pengetahuan sebesar Rp16.000.000,00. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di Pusdiklat AP dan kekurangan anggaran capacity building Pusdiklat AP;
 - 3) pada BPPK Pusat (411868), pemenuhan RO Pembelajaran Klasikal Pusdiklat KU sebesar Rp9.500.000,00 yang diambil dari RO Pembelajaran digital.
2. Revisi DIPA 13.6 tanggal 4 November 2024 yang merupakan Revisi Kewenangan DJA. Revisi ini ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-732/AG/AG.3/2024 tanggal 4 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan TA 2024 (Revisi ke-9). Adapun revisi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. terdapat pergeseran anggaran antar satker dari Politeknik Keuangan Negara STAN (477198) ke BPPK Pusat (411868) sebesar Rp3.000.000.000 dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja modal;
 - b. terdapat pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Yogyakarta (561178) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional kantor sebesar Rp85.000.000;
 - c. terdapat pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Makassar (561225) dalam rangka memenuhi kebutuhan Pelatihan Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA sebesar Rp276.157.000;
 - d. terdapat pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Medan (561199), BDK Pekanbaru (675720), dan BDK Cimahi (622429) untuk memenuhi kebutuhan RO Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit masing-masing sebesar Rp5.000.000;
 - e. terdapat pergeseran anggaran antar satker dari BPPK Pusat (411868) ke BDK Malang (561182) untuk memenuhi kebutuhan peralatan fasilitas perkantoran sebesar Rp80.000.000;

- f. terdapat pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja barang ekstrakomptabel pada RO Peralatan Fasilitas Perkantoran BPPK Pusat (411868) sebesar Rp4.950.000;
- g. terdapat penambahan anggaran belanja barang operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan gedung/bangunan pada satker:
 - 1) PKN STAN (477198) sebesar Rp200.000.000,
 - 2) BDK Medan (561199) sebesar Rp282.888.000,
 - 3) BDK Palembang (561204) sebesar Rp 200.245.000,
 - 4) BDK Cimahi (622429) sebesar Rp113.327.000,
 - 5) BDK Yogyakarta (561178) sebesar Rp90.000.000, dan
 - 6) BDK Manado (636799) sebesar Rp185.428.000;
- h. terdapat pengurangan anggaran belanja barang operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja barang non operasional dan belanja modal pada satker:
 - 1) BPPK Pusat (411868) sebesar Rp244.490.000,
 - 2) BDK Pekanbaru (675720) sebesar Rp44.480.000,
 - 3) BDK Malang (561182) sebesar Rp97.499.000,
 - 4) BDK Pontianak (675734) sebesar Rp60.876.000, dan
 - 5) BDK Balikpapan (561232) sebesar Rp204.385.000;
- i. terdapat pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp3.462.000, RO Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.686.000, RO Peralatan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp222.416.000, dan RO Gedung/Bangunan sebesar Rp903.190.000 pada BPPK Pusat (411868) dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja modal pada RO Peralatan Fasilitas Perkantoran dan RO Gedung/Bangunan;
- j. terdapat penambahan pagu dan penambahan detail pekerjaan pada RO Gedung/Bangunan pada BPPK Pusat (411868) yang dipenuhi dari sisa anggaran kontraktual tersebut.

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan
Rp35.618.496.398

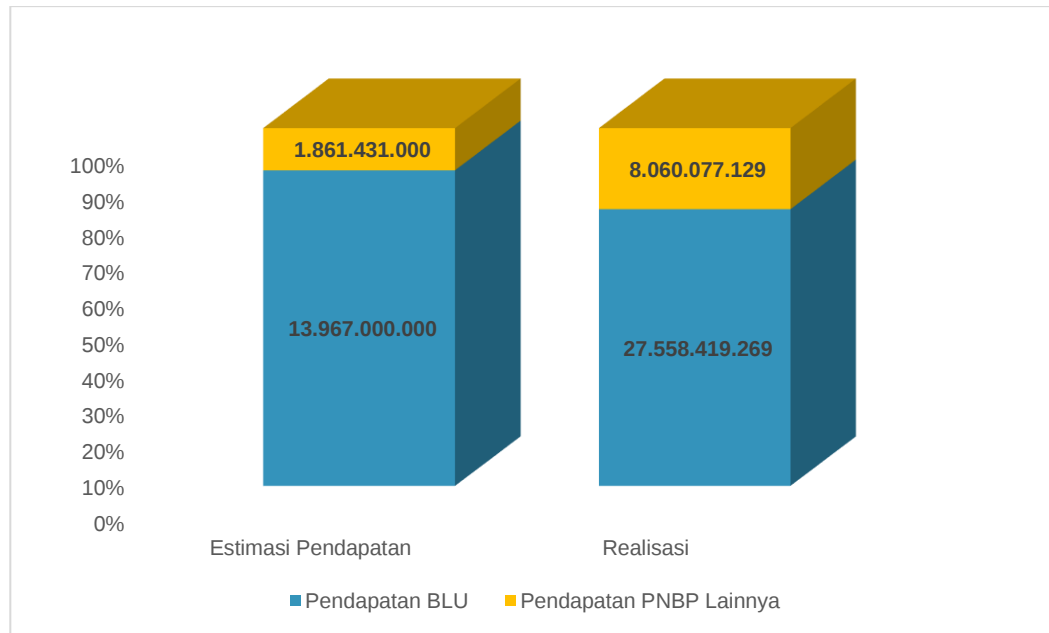
Realisasi Pendapatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp35.618.496.398 atau mencapai 225,03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp15.828.431.000. Pendapatan lingkup BPPK terdiri dari Pendapatan dari Badan

Layanan Umum (BLU) PKN STAN dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Kode Akun	Uraian Pendapatan	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN BLU	13.967.000.000	27.558.419.269	197,31
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10.682.000.000	12.554.544.481	117,53
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	-	864.875.000	0,00
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	536.382.883	0,00
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	2.108.665.831	0,00
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	4.259.761.882	0,00
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.060.000.000	6.133.450.584	200,44
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	50.752.000	0,00
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	225.000.000	720.323.974	320,14
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	323.659.931	0,00
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	6.002.703	0,00
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	1.861.431.000	8.060.077.129	433,00
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	3.000.000	11.574.000	385,80
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	717.500.000	2.609.402.151	363,68
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	36.104.000	392.673.250	1087,62
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	79.827.000	218.503.738	273,72
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.025.000.000	2.199.000.000	214,54
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	352.320.000	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	38.700.000	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	256.815.412	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4.842.750	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	40.484.509	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.935.567.319	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	194.000	0,00
	TOTAL	15.828.431.000	35.618.496.398	225,03

Komposisi estimasi dan realisasi pendapatan BPPK sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPPK Per 31 Desember 2024

Realisasi PNBP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp12.874.491.652 atau 56,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun penjelasan realisasi pendapatan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan yang berasal dari Pendapatan BLU PKN STAN adalah sebesar Rp9.499.765.046 atau 52,61% di mana pada Tahun 2024 sebesar Rp27.558.419.269 dan Tahun 2023 sebesar Rp18.058.654.223 dengan penjelasan berikut ini.
 - a. Terdapat peningkatan pada Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp7.547.374.057 atau 150,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada pendapatan ini terutama berasal dari meningkatnya realisasi pendapatan dari pendaftaran USM PKN STAN (sebesar Rp369.300.000), dan peningkatan dari kerja sama pendidikan dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Republik Timor Leste, dan pembibitan mahasiswa dari Provinsi/Pemerintah Daerah yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya (meningkat sebesar Rp7.089.228.353). Pendapatan sebesar Rp12.554.544.481 ini berasal dari pendapatan biaya pendaftaran Ujian Masuk PKN STAN sebesar Rp2.525.700.000, layanan terjemah ijazah sebesar Rp48.783.784, biaya pendidikan Program Diploma IV Manajemen Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik dari Kementerian PUPR sebesar Rp280.000.000, pendapatan layanan pelaksanaan pendidikan Program Diploma IV kerja sama RDTL (Republik Demokratic

- Timor Leste) sebesar Rp3.295.466.723, layanan kerjasama program pembibitan dengan Pemda/Pemkot (Pemkab Jember, Pemkot Cirebon, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Kayong Utara, Pemkab Tanah Laut, Tulang Bawang Barat, Musi Rawas, Bengkulu, Provinsi Sulawesi Utara, Muara Enim, Demak, Bombana, Penukal Abab Lematang Ilir, Subang, Tabalong, Brebes, Bungo, Kebumen, Pali. Karawang, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp5.270.932.662, program beasiswa TIAS sebesar Rp830.241.892, pendapatan denda perpustakaan sebesar Rp1.520.318, layanan penjualan buku sebesar Rp12.675.000, serta Pendapatan dari biaya registrasi PSIC 2024 sebesar Rp99.099.102.
- b. Terdapat Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang pada tahun 2024 sebesar Rp864.875.000 yang berasal dari layanan Pelatihan Penilaian Tingkat Dasar BMD Angkatan III dan V sebanyak 58 peserta, pelatihan BMD Lanjutan, dan kerja sama pelatihan lainnya yang dibiayai dari hibah Asian Development Bank. Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp651.000.000 dibandingkan tahun sebelumnya.
 - c. Penurunan pada Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan sebesar Rp311.417.117 atau 36,73%. Penurunan ini disebabkan peserta kegiatan ujian brevet pajak tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan sebesar Rp536.382.883 ini berasal dari layanan ujian brevet pajak.
 - d. Penurunan pada Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha sebesar Rp1.051.239.500 atau 33,27%. Penurunan ini disebabkan kerja sama pelatihan Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp2.108.665.831 ini berasal dari biaya pelatihan perpajakan (setara Brevet A dan B) dari BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan Penilaian BMN dari Kejaksaan Agung, pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dari LPDB, pelatihan Manajemen Proyek dari Kementerian Perhubungan, kegiatan *workshop* Pemberdayaan Desa dan BUMDes Tahun 2024 dari DJPK, layanan Kajian Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dari Sekretariat Kementerian PPPA, pelatihan penilaian barang di Universitas Diponegoro, pelatihan dengan Pemerintah RDTL, manajemen resiko dari Poltekkes Jakarta, PIPK, layanan Konsultasi dan Asistensi Akuntansi dan Keuangan, pelatihan Bendahara, Renstra, dan lain-lain.
 - e. Peningkatan pada Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah sebesar Rp89.367.814 atau 2,14%. Peningkatan ini disebabkan pada

Tahun 2024 kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan Pemerintah Daerah lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun realisasi pendapatan kerja sama pelatihan sebesar Rp4.259.761.882 berasal dari Pelatihan Juru Sita dan Penagihan Pajak Daerah, Pelatihan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah, Pelatihan Penilai PBB-P2, Pelatihan Bendahara, Pelatihan Pengelolaan BMD yang telah dilakukan dengan beberapa lembaga diantaranya: Pemkab Minahasa Utara, PDAM, Pemkot Surabaya, dan Multipemda, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD, pelatihan Analitika Data, pelatihan Akuntansi Daerah, kajian Penggalan Potensi Pajak Daerah, dan lain-lain.

- f. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami peningkatan sebesar Rp2.240.634.605 atau 57,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya penarikan dana deposito dan diinventasikan ulang dengan jangka waktu yang berbeda dari sebelumnya sehingga terdapat kenaikan bunga deposito/simpanan.
 - g. Terdapat Pendapatan Lain-lain BLU pada Tahun 2024 sebesar Rp50.752.000. Pendapatan ini berasal dari pengembalian Belanja BLU Tahun Anggaran Yang Lalu.
 - h. Kenaikan pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp332.979.974 atau 85,96%. Peningkatan ini berasal dari meningkatkan sewa gedung G dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp720.323.974 ini berasal dari penyewaan gedung G PKN STAN.
 - i. Penurunan pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp44.887.769 atau 12,18%. Pendapatan sebesar Rp323.659.931 ini berasal dari sewa kantin, lapangan basket, lapangan tenis, dan lapangan *mini soccer* PKN STAN yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
 - j. Peningkatan pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.002.703 atau 57,97%. Pendapatan sebesar Rp6.002.703 ini berasal dari sewa kendaraan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Secara total, PNBП Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp3.374.726.606 atau naik 72,03% di mana pada Tahun 2024 sebesar Rp8.060.077.129 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp4.685.350.523. PNBП Lainnya lingkup BPPK merupakan penerimaan pendapatan yang bersifat insidental, kecuali untuk Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya. Penerimaan pendapatan yang berasal dari PNBП

lainnya sebagian mengalami peningkatan dan sebagian turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penjelasan berikut ini.

- a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp17.901.600 atau turun 60,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini karena jumlah arsip inaktif yang dilelang tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp11.574.000 berasal dari lelang arsip inaktif pada Sekretariat BPPK, BDK Makassar, dan PKN STAN.
- b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp973.801.986 atau 59,54%. Peningkatan ini terutama berasal dari penjualan kendaraan dinas yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp2.609.402.151 ini berasal dari lelang BMN yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024, diantaranya: lelang kendaraan operasional kantor (pada Sekretariat BPPK, BDK Manado, BDK Denpasar), dan lelang BMN Peralatan dan Mesin (pada Sekretariat BPPK, BDK Makassar, BDK Balikpapan, BDK Manado, BDK Medan, dan BDK Palembang).
- c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp129.884.682 atau 49,43%. Realisasi pendapatan sebesar Rp392.673.250 pada Tahun 2024 berasal dari lelang bongkaran gedung di Sekretariat BPPK, PKN STAN, BDK Palembang, dan BDK Balikpapan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
- d. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp90.661.338 atau 70,92%. Pendapatan sewa mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatkan sewa asrama baik di Pusdiklat maupun Balai Diklat di lingkup BPPK. Pendapatan sewa sebesar Rp218.503.738 lingkup BPPK sampai dengan Tahun 2024 ini berasal dari penerimaan dari penerimaan dari sewa kantin lingkup Sekretariat BPPK, penerimaan dari sewa auditorium Pusdiklat Bea Cukai, dan penerimaan dari sewa asrama (Balai Diklat Kepemimpinan, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Balikpapan, BDK Cimahi, BDK Pontianak, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, dan Pusdiklat).
- e. Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp308.000.000 atau 16,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan sebesar Rp2.199.000.000 ini berasal dari kegiatan Sertifikasi Ahli Kepabeanan dan Cukai pada

- Pusdiklat Bea Cukai yang mengalami peningkatan jumlah pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya.
- f. Pendapatan Pendidikan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp90.880.000 atau 20,51%. Pendapatan sebesar Rp352.320.000 ini berasal dari penggantian biaya pendidikan di PKN STAN bagi mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikan karena mengundurkan diri atau *drop out* yang pada tahun ini lebih sedikit mahasiswa yang keluar dibandingkan tahun sebelumnya.
 - g. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengalami penurunan sebesar Rp52.170.000. Pendapatan sebesar Rp38.700.000 ini berasal dari pembayaran atau pelunasan ganti kerugian negara atas ikatan dinas pegawai. Pada Tahun 2024 terdapat setoran ganti rugi sebesar yang berasal dari pegawai yang mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan, yaitu Agnes Renata (Rp26.100.000) dan Abdul Gaffur A Dama (Rp4.000.000). Sedangkan TGR atas kehilangan BMN dan sudah dilakukan pelunasan ganti rugi, yaitu atas nama Rahmadi Murwanto (Rp4.300.00), dan Sakti Prabowo (Rp4.300.000).
 - h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah mengalami peningkatan sebesar Rp149.566.210 atau 139,46% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya nilai denda keterlambatan pekerjaan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp256.815.412 ini berasal dari pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari penyedia yang disetorkan ke kas negara, antara lain berasal dari pembayaran denda keterlambatan pengadaan konsumsi *Workshop Fraud Risk Management* (Rp546.000), denda keterlambatan pengadaan konsumsi pelatihan pembelajaran klasikal Triwulan I Pusdiklat Keuangan Umum (Rp730.800), denda pengadaan konsumsi pelatihan Pusdiklat Keuangan Umum periode April - Mei (Rp45.000), denda pengadaan jasa penulisan buku biografi Herry Purnomo (Rp3.368.918), denda pengadaan seragam dan perlengkapan pelatihan teknis penguatan karakter talent jabatan administrator Angkatan 1 (Satu) s.d. 4 (Empat) Pusdiklat Bea dan Cukai TA 2024 (Rp411.810), pengadaan konsumsi Pelatihan Teknis Penguatan Karakter Talent Jabatan Administrator Angkatan I s.d. IV TA 2024 (Rp309.960) pada Sekretariat Badan; denda keterlambatan penyelesaian konstruksi renovasi asrama (Rp122.113.400) di BDK Yogyakarta; denda keterlambatan pekerjaan talud

(Rp50.550.131), denda keterlambatan pembangunan pagar belakang gedung kelas dan asrama (Rp629.784), denda keterlambatan pekerjaan pengecatan eksterior gedung asrama (Rp538.236) di BDK Manado; denda keterlambatan pengadaan meja dan lemari (Rp30.345.946) di BDK Balikpapan; denda keterlambatan pekerjaan renovasi rumah negara (Rp43.281.560) di BDK Cimahi; denda keterlambatan pengadaan jasa konsumsi sebesar Rp477.200 (BDK Makassar), denda keterlambatan atas pengadaan *Wireless Lan Controller* (WLC) (Rp3.466.667) di PKN STAN.

- i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.511.750 atau 107,75%.Pendapatan sebesar Rp4.842.750 ini berasal dari pengembalian uang makan bulan tahun lalu pada Sekretariat BPPK, PKN STAN, dan BDK Malang.
- j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar Rp14.843.843 atau 57,89%. Pendapatan sebesar Rp40.484.509 ini berasal dari pengembalian belanja barang tahun lalu beberapa satker di lingkungan BPPK diantaranya:
 - 1) pengembalian kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas FGD Pembahasan Proses Bisnis Pusdiklat Bea dan Cukai 2024 (Rp150.000), kelebihan bayar honor Penguji Praktik Kabin Kargo II (Rp900.000), kelebihan bayar honor Penguji Praktik Kabin Kargo III Tahun Anggaran 2023 (Rp750.000), pengembalian belanja honorarium penulis artikel *WCO International Conference* (Rp7.265.167) pada Sekretariat Badan;
 - 2) kelebihan pembayaran perjalanan dinas PKA sebesar Rp973.239 pada Balai Diklat Kepemimpinan;
 - 3) kelebihan pembayaran terkait dengan temuan Inspektorat Jenderal dari beberapa penyedia sebesar Rp9.626.755 di PKN STAN;
 - 4) penggantian biaya listrik dari pelaksana konstruksi sebesar Rp3.000.000 di BDK Yogyakarta;
 - 5) pengembalian honorarium PPNPN sebesar Rp640.000 di BDK Medan;
 - 6) setoran dari penyedia atas temuan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp7.811.932 di BDK Cimahi; dan
 - 7) setoran pengembalian belanja dari penyedia terkait dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebesar Rp9.367.416 di BDK Malang.

- k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami peningkatan sebesar Rp1.896.227.237 atau 4.820,09% dari tahun sebelumnya. Pendapatan sebesar Rp1.935.567.319 ini berasal dari setoran pengembalian belanja dari penyedia terkait dengan temuan Inspektorat Jenderal pada PKN STAN sebesar Rp11.062.600, setoran pengembalian belanja dari PT Adhi Karya atas temuan pemeriksaan BPK RI tahun 2015 – 2017 pada Pusdiklat Pajak sebesar Rp1.919.004.719, dan setoran pengembalian belanja terkait pengujian hydrant sebesar Rp5.500.000 di BDK Pontianak.
- l. Pendapatan Anggaran Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp29.818.840 atau 99,35%. Penurunan ini disebabkan pada tahun ini terdapat penerimaan sebesar Rp194.000 yang berasal dari setoran akibat kesalahan nominal transfer dan setoran yang tidak diketahui asalnya pada Sekretariat BPPK, sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat penerimaan yang berasal dari pembayaran kekurangan sewa kantin 2002-2003 di PKN STAN sebesar Rp27.625.000 dan penggantian biaya listrik di BDK Balikpapan sebesar Rp2.387.840.

Perbandingan realisasi pendapatan BPPK Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Uraian Pendapatan	Realisasi PNB		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Rp	%
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	27.558.419.269	18.058.654.223	9.499.765.046	52,61
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	12.554.544.481	5.007.170.424	7.547.374.057	150,73
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	864.875.000	213.875.000	651.000.000	304,38
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	536.382.883	847.800.000	(311.417.117)	(36,73)
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.108.665.831	3.159.905.331	(1.051.239.500)	(33,27)
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	4.259.761.882	4.170.394.068	89.367.814	2,14
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.133.450.584	3.892.815.979	2.240.634.605	57,56
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	50.752.000	7.001.721	43.750.279	624,85
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	720.323.974	387.344.000	332.979.974	85,96
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	323.659.931	368.547.700	(44.887.769)	(12,18)
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	6.002.703	3.800.000	2.202.703	57,97
	PENDAPATAN PNB LAINNYA	8.060.077.129	4.685.350.523	3.374.726.606	72,03
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	11.574.000	29.475.600	(17.901.600)	(60,73)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.609.402.151	1.635.600.165	973.801.986	59,54

Akun	Uraian Pendapatan	Realisasi PNB		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Rp	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	392.673.250	262.788.568	129.884.682	49,43
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	218.503.738	127.842.400	90.661.338	70,92
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2.199.000.000	1.891.000.000	308.000.000	16,29
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	352.320.000	443.200.000	(90.880.000)	(20,51)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	38.700.000	90.870.000	(52.170.000)	(57,41)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	256.815.412	107.249.202	149.566.210	139,46
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.842.750	2.331.000	2.511.750	107,75
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	40.484.509	25.640.666	14.843.843	57,89
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.935.567.319	39.340.082	1.896.227.237	4.820,09
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	194.000	30.012.840	(29.818.840)	(99,35)
	JUMLAH	35.618.496.398	22.744.004.746	12.874.491.652	56,61

Adapun Rincian estimasi dan realisasi PNB per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNB per Satuan Kerja

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	411868	BPPK Pusat	1.758.436.000	6.473.003.331	368,11
2	477198	PKN STAN	13.967.000.000	28.330.998.991	202,84
3	561199	BDK Medan	3.000.000	16.810.000	560,33
4	675720	BDK Pekanbaru	8.000.000	42.364.000	529,55
5	561204	BDK Palembang	100.000	14.582.743	14582,74
6	622429	BDK Cimahi	5.049.000	52.040.292	1030,70
7	561178	BDK Yogyakarta	1.242.000	146.713.400	11812,67
8	561182	BDK Malang	7.104.000	26.422.416	371,94
9	675741	BDK Denpasar	-	87.000.000	0,00
10	675734	BDK Pontianak	-	35.182.896	0,00
11	561232	BDK Balikpapan	9.000.000	115.753.390	1286,15
12	561225	BDK Makassar	50.000.000	85.705.549	171,41
13	636799	BDK Manado	19.500.000	188.546.151	966,90
14	411874	BD Pim Magelang	-	3.373.239	0,00
		TOTAL	15.828.431.000	35.618.496.398	225,03

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja
Rp710.468.086.787

Realisasi belanja selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp710.468.086.787 atau 97,49% dari anggaran belanja sebesar Rp728.761.335.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

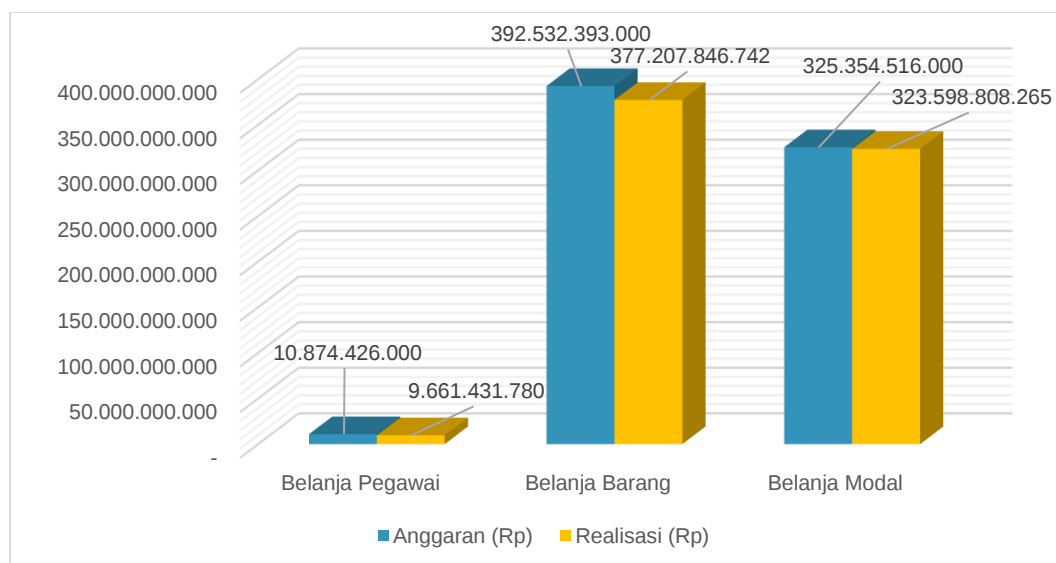
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	10.874.426.000	9.661.431.780	88,85
52	Belanja Barang	392.532.393.000	377.885.053.342	96,27
53	Belanja Modal	325.354.516.000	323.598.808.265	99,46
	Total Belanja Bruto	728.761.335.000	711.145.293.387	97,58
	Pengembalian Belanja		(677.206.600)	
	Belanja Netto	728.761.335.000	710.468.086.787	97,49

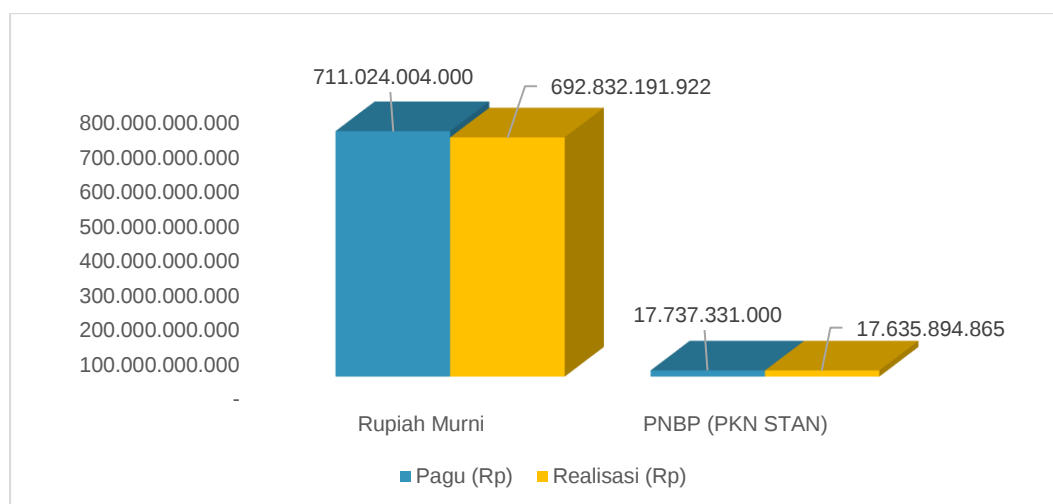
Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

No	Jenis Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	711.024.004.000	692.832.191.922	97,44
2	BLU (PKN STAN)	17.737.331.000	17.635.894.865	99,43
	TOTAL	728.761.335.000	710.468.086.787	97,49

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2 Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2024



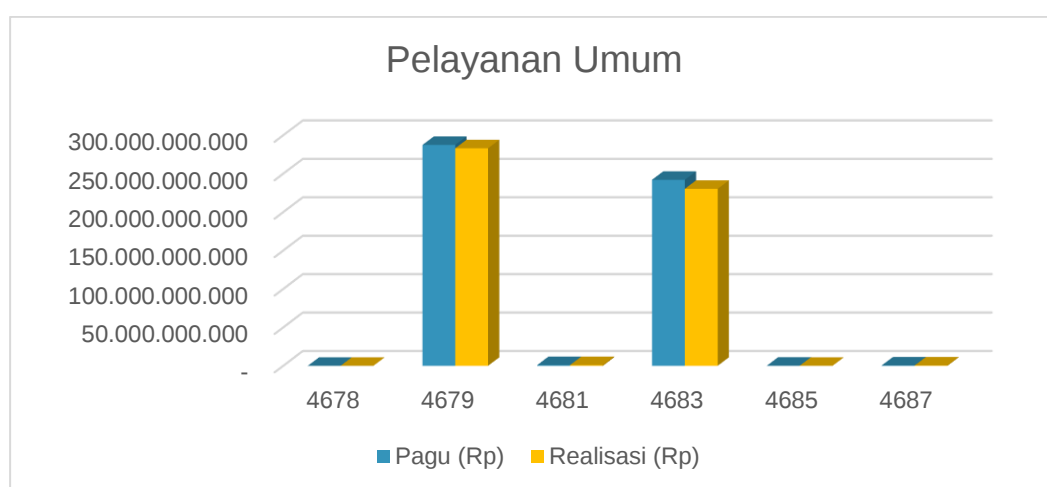
Gambar 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana Tahun 2024

Realisasi belanja berdasarkan jenis kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Gambar 4.

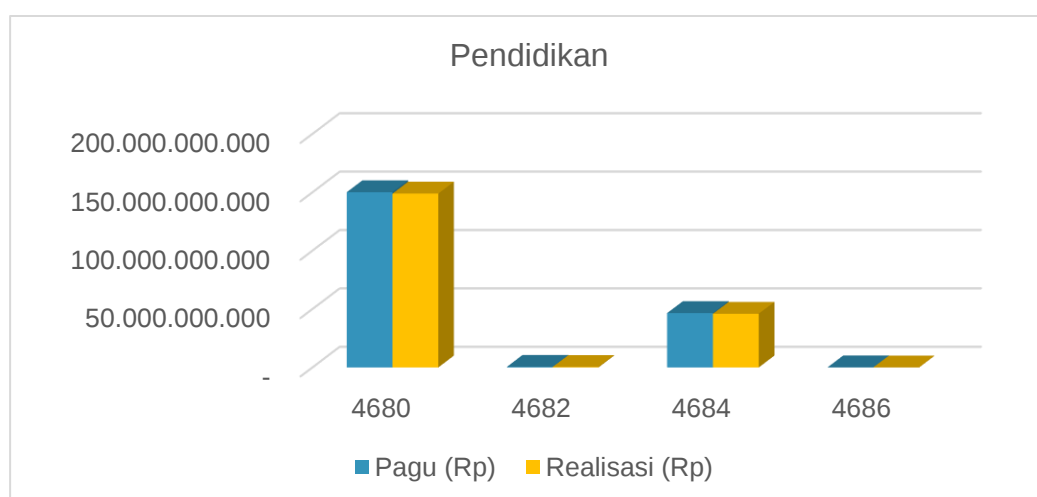
Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Program/Fungsi/Kegiatan Tahun 2024

Kode Prog/Fgs/ Keg.	Nama Program/Fungsi/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	728.761.335.000	710.468.086.787	97,49
01	Pelayanan Umum	531.426.427.000	515.033.981.549	96,92
4678	Legislasi dan Litigasi	21.488.000	9.653.316	44,92
52	Belanja Barang	21.488.000	9.653.316	44,92
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	287.498.296.000	283.131.598.821	98,48
52	Belanja Barang	79.240.075.000	75.791.253.970	95,65
53	Belanja Modal	208.258.221.000	207.340.344.851	99,56
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1.043.056.000	962.350.415	92,26
52	Belanja Barang	1.043.056.000	962.350.415	92,26
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	242.111.587.000	230.341.411.210	95,14
51	Belanja Pegawai	8.522.229.000	7.373.256.000	86,52
52	Belanja Barang	233.589.358.000	222.968.155.210	95,45
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	190.558.000	128.437.045	67,40
52	Belanja Barang	190.558.000	128.437.045	67,40
4687	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	561.442.000	460.530.742	82,03
52	Belanja Barang	561.442.000	460.530.742	82,03
10	Pendidikan	197.334.908.000	195.434.105.238	99,04
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	150.114.687.000	148.924.856.691	99,21
52	Belanja Barang	33.018.392.000	32.666.393.277	98,93

Kode Prog/Fgs/Keg.	Nama Program/Fungsi/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
53	Belanja Modal	117.096.295.000	116.258.463.414	99,28
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	545.934.000	438.271.184	80,28
52	Belanja Barang	545.934.000	438.271.184	80,28
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM	46.586.082.000	46.010.861.892	98,77
51	Belanja Pegawai	2.352.197.000	2.288.175.780	97,28
52	Belanja Barang	44.233.885.000	43.722.686.112	98,84
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	88.205.000	60.115.471	68,15
52	Belanja Barang	88.205.000	60.115.471	68,15



Gambar 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum Per Kegiatan Tahun 2024



Gambar 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan per Kegiatan Tahun 2024

Adapun penjelasan realisasi belanja berdasarkan fungsi secara umum sebagai berikut:

- a. Pelayanan Umum: realisasi ini terutama berasal dari penyelenggaraan beasiswa lingkup Kementerian Keuangan, kegiatan pelatihan baik klasikal maupun digital, kegiatan seminar/lokakarya *Training of Trainers*, keperluan perkantoran, keperluan-keperluan lainnya penunjang TUSI, pengadaan belanja modal yang pada tahun ini terutama terkait dengan peningkatan fasilitas asrama satker lingkup BPPK berupa renovasi asrama dan pembelian perlengkapan asrama, pembangunan gedung kantor Balai Diklat Keuangan Denpasar, pengadaan kendaraan dinas, dan beberapa kegiatan lainnya;
- b. Pendidikan: realisasi ini terutama berasal dari penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan PKN STAN, kerja sama pelatihan antara PKN STAN dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah, pembangunan gedung asrama PKN STAN, dan kegiatan lainnya lingkup PKN STAN.

Pagu dan realisasi anggaran per Satuan Kerja di lingkungan BPPK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Pagu dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Tahun 2024

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	411868	Sekretariat Badan	304.016.340.000	290.935.979.038	95,70
2	477198	Politeknik Keuangan Negara STAN	197.334.908.000	195.434.105.238	99,04
3	561199	BDK Medan	8.360.697.000	8.108.486.776	96,98
4	675720	BDK Pekanbaru	8.702.633.000	8.104.361.118	93,13
5	561204	BDK Palembang	7.662.270.000	7.417.011.985	96,80
6	622429	BDK Cimahi	10.938.336.000	10.664.820.856	97,50
7	561178	BDK Yogyakarta	5.238.170.000	4.913.420.064	93,80
8	561182	BDK Malang	7.271.051.000	7.036.060.341	96,77
9	675741	BDK Denpasar	145.219.281.000	144.700.408.229	99,64
10	675734	BDK Pontianak	5.345.984.000	5.079.059.716	95,01
11	561232	BDK Balikpapan	15.717.259.000	15.540.008.636	98,87
12	561225	BDK Makassar	3.493.905.000	3.259.984.615	93,30
13	636799	BDK Manado	5.907.864.000	5.730.060.697	96,99
14	411874	BD Kepemimpinan Magelang	3.552.637.000	3.544.319.478	99,77
TOTAL			728.761.335.000	710.468.086.787	97,49

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya realisasi belanja pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp289.378.889.296 atau naik 68,72% di mana realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp710.468.086.787 dan

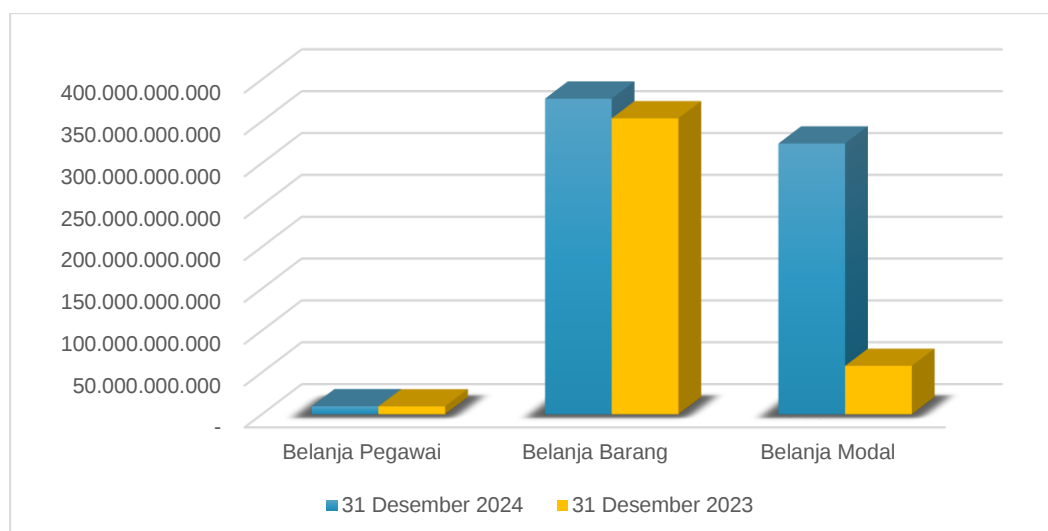
pada tahun sebelumnya sebesar Rp421.089.197.491. Secara umum peningkatan realisasi belanja ini berasal dari beberapa kegiatan berikut ini.

1. Peningkatan realisasi Belanja Barang terutama berasal dari peningkatan yang signifikan dari Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Jasa dari kegiatan pelatihan secara klasikal, peningkatan realisasi dari karyasiswa beasiswa, peningkatan realisasi kegiatan pelatihan yang baru ada di tahun 2024 sebagai Proyek Unggulan BPPK (Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak (PU), Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah (PU), Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU)), peningkatan realisasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diploma PKN STAN, dan peningkatan realisasi dari beberapa kegiatan lainnya.
2. Peningkatan dari realisasi Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan gedung asrama mahasiswa PKN STAN, pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar, dan pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan kualitas asrama.

Perbandingan realisasi belanja BPPK menurut jenis belanja antara Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 13 dan Gambar 6.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
51	Belanja Pegawai	9.661.431.780	9.517.666.400	143.765.380	1,51
52	Belanja Barang	377.207.846.742	353.648.825.777	23.559.020.965	6,66
53	Belanja Modal	323.598.808.265	57.922.705.314	265.676.102.951	458,67
	Belanja Netto	710.468.086.787	421.089.197.491	289.378.889.296	68,72



Gambar 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp9.661.431.780

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp9.661.431.780 dan Rp9.517.666.400. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai BPPK pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp143.765.380 atau naik 1,51% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya belanja lembur pegawai dan adanya belanja gaji untuk PPPK yang pada tahun sebelumnya belum ada.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 14 sedangkan perbandingan antara realisasi belanja pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada

Tabel 15.

Tabel 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.880.290.000	8.907.280.000	90,15
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	62.864.000	55.428.780	88,17
5122	Belanja Lembur	931.272.000	698.723.000	75,03

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah Bruto	10.874.426.000	9.661.431.780	88,85
	Pengembalian Belanja		-	
	Jumlah Neto	10.874.426.000	9.661.431.780	88,85

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Belanja Pegawai	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.907.280.000	9.323.464.000	(416.184.000)	(4,46)
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	55.428.780	-	55.428.780	0,00
5122	Belanja Lembur	698.723.000	194.763.000	503.960.000	258,76
	Jumlah Bruto	9.661.431.780	9.518.227.000	143.204.780	1,50
	Pengembalian Belanja	-	(560.600)	560.600	(100,00)
	Jumlah Neto	9.661.431.780	9.517.666.400	143.765.380	1,51

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp377.207.846.742

Realisasi Belanja Barang periode Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp377.207.846.742 dan Rp353.648.825.777.

Realisasi Belanja Barang periode Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.559.020.965 atau 6,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun penjelasan kondisi belanja barang selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Realisasi sebesar Rp45.172.135.981 pada Belanja Barang Operasional antara lain: digunakan untuk pembayaran gaji/honorarium PPNP (petugas kebersihan, pramubakti, satpam, dokter, pengemudi, perawat), pengadaan seragam bagi pegawai dan PPNP, pembayaran honorarium operasional satker (pembayaran honorarium pengelola keuangan APBN seperti: KPA, PPK, PPSPM, PPBJ, Pengurus BMN, Pengurus Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf PPK, staf KPA), biaya penggunaan *Call Center*, belanja perlengkapan Poliklinik/kantor, pembayaran langganan lisensi aplikasi, pembelian keperluan kebersihan, serta keperluan-keperluan perkantoran lainnya. Belanja Barang Operasional lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu naik sebesar Rp1.749.814.836 atau 4,03%. Penjelasan terkait dengan peningkatan ini antara lain: meningkatnya pagu Belanja

Operasional sesuai dengan kebutuhan, dan meningkatnya realisasi dari pembayaran lisensi/software/perangkat lunak dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Realisasi Belanja Barang Non Operasional lingkup BPPK sebesar Rp185.814.705.426 digunakan untuk kegiatan pembelajaran/pelatihan yang dilakukan secara klasikal dan digital, penyelenggaraan seminar/lokakarya, penyelenggaraan karyasiswa beasiswa, penyelenggaraan pendidikan diploma PKN STAN, pengembangan sumber daya manusia, beberapa kegiatan pelatihan yang menjadi Proyek Unggulan (PU) di BPPK, dan beberapa kegiatan lainnya. Belanja Barang Non Operasional lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp15.345.969.877 atau 9,00% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan dari realisasi pembayaran karyasiswa beasiswa dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan realisasi kegiatan pelatihan yang baru ada di tahun 2024 sebagai Proyek Unggulan BPPK (Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak (PU), Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah (PU), Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU)), dan peningkatan pada beberapa kegiatan lainnya.
3. Realisasi Belanja Persediaan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.411.832.778. Belanja Persediaan lingkup BPPK tidak hanya digunakan untuk keperluan perkantoran, tetapi sebagian besar digunakan untuk pembelian ATK dan keperluan pelatihan. Belanja Barang Persediaan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terdapat penurunan sebesar Rp306.111.742 atau 5,35%. Penurunan ini disebabkan menurunnya pagu Belanja Persediaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga realisasi belanja persediaan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sesuai dengan kebutuhan di tahun 2024.
4. Realisasi Belanja Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp72.128.175.675 digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber atau pengajar kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya, pembayaran langganan daya dan jasa, dan pembayaran jasa lainnya di beberapa kegiatan. Belanja Jasa lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat peningkatan sebesar Rp4.166.352.962 atau 6,13%. Kenaikan ini berasal dari peningkatan realisasi dari belanja honorarium narasumber pada kegiatan pelatihan klasikal, kegiatan *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan yang pada tahun sebelumnya tidak ada, belanja jasa lainnya pada

kegiatan penyelenggaraan karyasiswa beasiswa, realisasi yang berasal Proyek Unggulan (PU) di BPPK Tahun 2024, peningkatan realisasi terkait dengan Belanja Jasa pada penyelenggaraan pendidikan diploma PKN STAN, peningkatan pada realisasi manajemen pengetahuan, peningkatan pada belanja langganan daya dan jasa (listrik, telepon, dan sewa), dan peningkatan realisasi yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia.

5. Realisasi Belanja Pemeliharaan pada Tahun 2024 sebesar Rp34.993.345.282 digunakan untuk pemeliharaan aset/BMN di lingkungan BPPK. Belanja Pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp6.579.268.683 atau 23,15%. Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan yang ada di satker-satker lingkup BPPK, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja persediaan pemeliharaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
6. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri BPPK sebesar Rp19.243.888.177 sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas peserta pelatihan dan sebagian untuk perjalanan dinas pegawai terkait pelaksanaan penugasan. Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp756.868.994 atau 4,09%. Peningkatan ini terutama berasal dari realisasi perjalanan dinas terkait dengan kegiatan pelatihan yang merupakan Proyek Unggulan (PU), yaitu pada kegiatan *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah (PU), Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara/Daerah/BUM Desa (PU), Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU), Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak (PU), dan kegiatan perkuliahan Program Diploma PKN STAN.
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami penurunan sebesar Rp4.184.331.969 atau 76,03%. Realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.319.346.474 berasal dari pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan *Executive Training Leadership And Public Policy* Tahun 2024, menghadiri *Islamic Development Bank (ISDB) Group Annual Meetings*, pelatihan *ACCA Trainer Camp 2024* di Malaysia, pelatihan kursus penilaian harta dan ladang di Malaysia, pelatihan *Course on Strategic Leadership and Governance* di Singapura, menghadiri *3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* di Brazil, mengikuti kegiatan *GDLN AP Regional Meeting and GDLN Global Board Meeting* di Filipina, pelatihan *Intellectual Property*

Valuation Course di Malaysia, kegiatan *The 9th Annual Meeting Of The Board Of Governors Of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, kegiatan *High Level Meeting* Tahun 2024 di Pulau Pinang, Malaysia, Pelatihan Kursus Pengenalan Harta Tanah Strata dan Stratum di Malaysia, kegiatan *WCO Asia/Pacific Regional Office For Capacity Building/Regional Training Centre Heads Meeting*, kegiatan Konferensi Internasional *25th Biennial Asian Studies Association of Australia (ASSA) 2024*, Konferensi Internasional *The 6th Advances in Business Research International Conference (ABRIC)* di Universiti Teknologi Mara.

8. Realisasi Belanja Barang BLU pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp13.801.623.549. Realisasi Belanja Barang BLU mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp614.614.589 atau 4,26%. Penurunan ini terutama berasal dari menurunnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 yang berasal dari penurunan honorarium pewawancara SPMB PKN STAN karena pada tahun 2024 tidak ada prosedur wawancara khusus dan pengecekan latar belakang calon mahasiswa.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja barang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 16, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja barang Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 16 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

Akun	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	46.051.990.000	45.172.135.981	98,09
5212	Belanja Barang Non Operasional	188.346.488.000	185.814.705.426	98,66
5218	Belanja Barang Persediaan	5.971.478.000	5.411.832.778	90,63
5221	Belanja Jasa	76.060.095.000	72.128.175.675	94,83
5231	Belanja Pemeliharaan	35.987.418.000	34.993.345.282	97,24
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	24.668.607.000	19.243.888.177	78,01
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.639.257.000	1.319.346.474	80,48
5251	Belanja Barang BLU	13.807.060.000	13.801.623.549	99,96
	Jumlah Bruto	392.532.393.000	377.885.053.342	96,27
	Pengembalian Belanja		(677.206.600)	
	Jumlah Neto	392.532.393.000	377.207.846.742	96,10

Tabel 17 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Belanja Barang	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
5211	Belanja Barang Operasional	45.172.135.981	43.422.321.145	1.749.814.836	4,03
5212	Belanja Barang Non Operasional	185.814.705.426	170.468.735.549	15.345.969.877	9,00
5218	Belanja Barang Persediaan	5.411.832.778	5.717.944.520	(306.111.742)	(5,35)
5221	Belanja Jasa	72.128.175.675	67.961.822.713	4.166.352.962	6,13
5231	Belanja Pemeliharaan	34.993.345.282	28.414.076.599	6.579.268.683	23,15
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	19.243.888.177	18.487.019.183	756.868.994	4,09
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.319.346.474	5.503.678.443	(4.184.331.969)	(76,03)
5251	Belanja Barang BLU	13.801.623.549	14.416.238.138	(614.614.589)	(4,26)
	Jumlah Bruto	377.885.053.342	354.391.836.290	23.493.217.052	6,63
	Pengembalian Belanja	(677.206.600)	(743.010.513)	65.803.913	(8,86)
	Jumlah Neto	377.207.846.742	353.648.825.777	23.559.020.965	6,66

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp323.598.808.265

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp323.598.808.265 dan Rp57.922.705.314. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp265.676.102.951 atau 458,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan terkait penyerapan anggaran belanja modal Tahun 2024.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu naik sebesar Rp20.579.875.158 atau 76,42%. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya pengadaan meubelair dan perlengkapan asrama sehubungan dengan peningkatan kualitas asrama di Balai Diklat, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan meubelair di BDK Denpasar, dan pengadaan videotron di Pusklat.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar Rp248.105.900.207 atau 1.029,66%. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar, pembangunan gedung asrama mahasiswa PKN STAN, dan pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan kualitas asrama di Balai Diklat Keuangan.

3. Belanja Modal Lainnya lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu turun sebesar Rp1.883.072.671 atau 97,22%. Penurunan ini disebabkan karena pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat renovasi gedung asrama di BDK Makassar yang merupakan aset milik GKN Makassar sehingga masih tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi.
4. Belanja Modal BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.126.599.743 atau turun 22,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berasal dari penurunan belanja modal gedung dan bangunan yang pada tahun sebelumnya digunakan renovasi toilet gedung D, dan pembayaran konsultan perencanaan untuk pekerjaan interior gedung N.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja modal Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 23, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 18 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.622.482.000	47.508.742.419	99,76
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	273.745.588.000	272.201.870.325	99,44
5361	Belanja Modal Lainnya	56.175.000	53.924.205,00	95,99
5371	Belanja Modal BLU	3.930.271.000	3.834.271.316	97,56
	Jumlah Bruto	325.354.516.000	323.598.808.265	99,46
	Pengembalian Belanja		-	
	Jumlah Neto	325.354.516.000	323.598.808.265	99,46

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Belanja Barang	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.508.742.419	26.928.867.261	20.579.875.158	76,42
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.201.870.325	24.095.970.118	248.105.900.207	1.029,66
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	53.924.205	1.936.996.876	(1.883.072.671)	(97,22)
5371	Belanja Modal BLU	3.834.271.316	4.960.871.059	(1.126.599.743)	(22,71)
	Jumlah Bruto	323.598.808.265	57.922.705.314	265.676.102.951	458,67
	Pengembalian Belanja	-	-	-	
	Jumlah Neto	323.598.808.265	57.922.705.314	265.676.102.951	458,67

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp47.508.742.419, mengalami kenaikan sebesar Rp20.579.875.158 atau 76,42% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beberapa belanja modal yang terealisasi pada Tahun 2024 antara lain:

- a. Sekretariat BPPK: pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan videotron di Sekretariat Badan dan Pusdiklat, pengadaan *mic conference*, pengadaan *AC standing*, pengadaan tempat tidur asrama, pengadaan meubelair, pengadaan smoke detector, pengadaan kamera, pengadaan UPS, pengadaan gordyn, pengadaan *virtual reality set*, pengadaan AC Cassette Gedung B dan Gedung E Sekretariat Badan, pengadaan *sound system* aula, pengadaan peralatan elektronik asrama;
- b. PKN STAN: pengadaan *Access Point* dan *Switch*, pengadaan AC Gedung B dan K, pengadaan alat blended learning, pengadaan furniture Gedung B, pengadaan AC Split, pengadaan kursi susun, pengadaan *Wireless LAN Controller* (WLC), pengadaan peralatan pendukung kelas perkuliahan;
- c. BDK Yogyakarta: pengadaan AC Split, pengadaan LCD Proyektor;
- d. BDK Malang: pengadaan meubelair asrama, kursi, televisi, tempat tidur asrama, peralatan/fasilitas perkantoran, dan gorden;
- e. BDK Medan : pengadaan kasur, kulkas mini, televisi untuk asrama, pengadaan Peralatan dan Mesin berupa *Air Conditioner* (AC) sebanyak 30 unit dan *Water Heater* sebanyak 30 unit dalam Rangka Peningkatan Fasilitas Asrama BPPK Tahun 2024;
- f. BDK Palembang: pengadaan tempat tidur asrama, water heater, dan perlengkapan asrama lainnya;
- g. BDK Makassar: pengadaan LCD Proyektor;
- h. BDK Balikpapan: pengadaan perlengkapan *Transit Office* dan hunian sementara;
- i. BDK Cimahi: pengadaan peralatan meubelair asrama, pengadaan perlengkapan kamar mandi, pengadaan peralatan elektronik asrama, perangkat microphone conference system, pengadaan peralatan studio, pengadaan furniture, dan pengadaan peralatan elektronik perkantoran;
- j. BDK Manado: pengadaan televisi;
- k. BDK Pekanbaru: pengadaan meubelair asrama;
- l. BDK Pontianak: pengadaan peralatan asrama; serta
- m. BDK Denpasar: pengadaan meubelair gedung BDK Denpasar.

Adapun pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat BPPK: pengadaan kendaraan dinas jabatan pengadaan access point pengadaan kebutuhan pada *guest house* Pusdiklat Bea Cukai (berupa: pengadaan kasur, meja belajar, *kitchen set*, dan lemari pakaian) pengadaan kebutuhan untuk asrama Pusdiklat Bea Cukai pengadaan meubelair pengadaan kebutuhan untuk asrama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (berupa: pengadaan kasur dan meubelair) pengadaan AC (Pusdiklat Keuangan Umum dan Pusdiklat Bea Cukai) pengadaan LCD Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pengadaan televisi (Sekretariat Badan dan Pusdiklat Bea Cukai) pengadaan *sound system* aula Gedung B Sekretariat Badan dan pengadaan peralatan elektronik untuk peningkatan asrama;
- b. PKN STAN: pengadaan furniture asrama PKN STAN pengadaan *access point* pengadaan proyektor Gedung N pengadaan alat jaringan data pengadaan sumur cadangan pengadaan peralatan fasilitas kelas Gedung N pengadaan mesin cuci asrama pengadaan alat pengukuran laboratorium pompa asrama;
- c. BDK Balikpapan: pengadaan tempat tidur dan perlengkapan asrama;
- d. BDK Makassar: pengadaan tempat tidur asrama;
- e. BDK Yogyakarta: pengadaan kebutuhan perlengkapan untuk peningkatan asrama (pengadaan AC televisi tempat tidur meja kursi lemari kamar) pengadaan perlengkapan perkantoran pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- f. BDK Palembang: pengadaan meubelair berupa lemari meja kursi; dan
- g. BDK Manado: pengadaan AC dan springbed.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.264.792.619	26.928.867.261	20.335.925.358	75,52
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	243.949.800	-	243.949.800	0,00
	Jumlah Bruto	47.508.742.419	26.928.867.261	20.579.875.158	76,42
	Pengembalian Belanja	-	-		
	Jumlah Neto	47.508.742.419	26.928.867.261	20.579.875.158	76,42

Tabel 21 Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian		Nilai (Rp)
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.508.742.419
MUTASI :		
	Pembelian Intra	48.839.554.492
	Pembelian Ekstra	1.463.232.929
	Penyelesaian pembangunan langsung	-
	Pengembangan langsung	243.949.800
	Perolehan KDP	119.604.809
	Pengembangan KDP	243.900.352
TOTAL MUTASI ASET		50.910.242.382
SELISIH		(3.401.499.963)
PENJELASAN SELISIH		
1	Pembelian Aset Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Barang Aset Ekstrakomptabel di beberapa satker	(1.320.306.929)
	a. Sekretariat BPPK	(119.564.850)
	b. BDK Medan	(292.424.310)
	c. BDK Pekanbaru	(203.630.225)
	d. BDK Palembang	(177.957.800)
	e. BDK Yogyakarta	(17.643.250)
	f. BDK Cimahi	(141.753.600)
	g. BDK Makassar	(4.202.820)
	h. BDK Balikpapan	(43.246.280)
	i. BDK Pontianak	(206.396.750)
	j. BDK Manado	(113.487.044)
2	Menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU (PKN STAN)	(2.081.193.034)
	JUMLAH	(3.401.499.963)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp272.201.870.325 dan Rp24.095.970.118. Adapun beberapa realisasi belanja modal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat BPPK: pekerjaan renovasi asrama B dan rumah negara Pusdiklat Bea Cukai (jasa konsultan perencana dan konstruksi), pembuatan drop off area asrama A Pusdiklat Bea Cukai, pekerjaan konstruksi renovasi pagar kantor Sekretariat BPPK, pekerjaan fisik selasar di Pusdiklat Pajak, pekerjaan fisik selasar di Pusdiklat Keuangan Umum, renovasi aula Sekretariat BPPK, renovasi ruangan di Pusdiklat Pajak, dan konsultan perencana pekerjaan *Sport Center* Pusdiklat Pajak;

- b. PKN STAN: pekerjaan pembangunan gedung asrama mahasiswa dan pendukung;
- c. BDK Malang: pekerjaan renovasi peningkatan kualitas asrama;
- d. BDK Medan: pekerjaan renovasi peningkatan kualitas asrama;
- e. BDK Palembang: pekerjaan renovasi peningkatan kualitas asrama;
- f. BDK Balikpapan: pekerjaan penataan layout transit office dan renovasi hunian sementara Kemenkeu;
- g. BDK Cimahi: pekerjaan renovasi rumah negara, pekerjaan renovasi gedung asrama;
- h. BDK Manado: pekerjaan renovasi peningkatan kualitas asrama;
- i. BDK Pontianak: pekerjaan renovasi gedung kantor;
- j. BDK Denpasar: pekerjaan pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar;
- k. BDK Pekanbaru: pembelian 2 unit Rumah Negara Tipe D, pembelian 1 (satu) unit Rumah Negara Tipe C.

Adapun pada Tahun 2023 terdapat pengadaan sebagai berikut:

- a. Sekretariat BPPK: pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan asrama lingkup BPPK pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebesar Rp6.693.034.581;
- b. BDK Yogyakarta: pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan asrama sebesar Rp2.728.592.500;
- c. BDK Malang: jasa konsultasi perencanaan renovasi lanjutan asrama C tandon air asrama C dan Gedung B sebesar Rp701.787.514;
- d. BDK Balikpapan: pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan asrama sebesar Rp1.010.547.929;
- e. BDK Cimahi: jasa konsultan perencana pengawas dan pelaksana konstruksi renovasi gedung kelas sebesar Rp752.174.468;
- f. PKN STAN: pekerjaan jasa konsultan perencanaan konstruksi dan konsultan manajemen konstruksi pada pembangunan gedung asrama mahasiswa dan masjid PKN STAN pengadaan jasa konsultan perencana Gedung D PKN STAN sebesar Rp4.036.323.235;
- g. BDK Manado: paket pekerjaan konstruksi talud dan pagar sebesar Rp2.003.951.605 renovasi rumah dinas sebesar Rp196.560.762;
- h. BDK Pekanbaru: pekerjaan konstruksi gedung/bangunan pos security sebesar Rp182.500.250;

- i. BDK Denpasar : pekerjaan jasa konsultan perencanaan konstruksi dan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung BDK Denpasar sebesar Rp3.375.355.654.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.467.968.162	17.767.552.817	221.700.415.345	1247,78
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	32.733.902.163	6.328.417.301	26.405.484.862	417,25
	Jumlah Bruto	272.201.870.325	24.095.970.118	248.105.900.207	1029,66
	Pengembalian Belanja		-	-	
	Jumlah Neto	272.201.870.325	24.095.970.118	248.105.900.207	1029,66

Tabel 23 Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian		Nilai (Rp)
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.201.870.325
MUTASI :		
	Pembelian Intra	
	Pembelian Ekstra	
	Penyelesaian pembangunan langsung	385.463.040
	Pengembangan langsung	8.051.508.681
	Perolehan KDP	3.320.806.688
	Pengembangan KDP	262.510.429.401
TOTAL MUTASI ASET		274.268.207.810
SELISIH		(2.066.337.485)
PENJELASAN SELISIH		
1	Terdapat koreksi nilai berkurang pada BMN di Sekretariat Badan	58.578.506
2	Menggunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU di PKN STAN	(1.753.078.282)
3	Terdapat koreksi nilai KDP pada PKN STAN	(89.495.081)
4	Terdapat koreksi nilai KDP pada BDK Palembang	(2.849.400)
5	Selisih karena BAPP Aset sudah diakui sesuai kemajuan pekerjaan, sementara pembayaran baru akan dilakukan di tahun berikutnya sesuai mekanisme RPATA	
	- BDK Cimahi	142.648.772

Uraian		Nilai (Rp)
6	Pencatatan Aset di awal tahun 2025 yang realisasi pembayarannya menggunakan mekanisme RPATA 2024	
	- BDK Yogyakarta	(267.637.131)
	- BDK Manado	(154.504.669)
	JUMLAH	(2.066.337.285)

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp53.924.205 dan Rp1.936.996.876. Realisasi Belanja Modal Lainnya ini berupa pembelian *software Spire doc for Java*, *software Nvivo*, dan pembelian lukisan pada Sekretariat BPPK. Selain itu, terdapat pembelian buku perpustakaan pada PKN STAN.

Adapun pada tahun 2023 terdapat realisasi:

- Sekretariat BPPK: pembelian software Survey JS Basic pembelian buku tarif kepabeanaan Indonesia;
- PKN STAN: pengadaan buku perpustakaan PKN STAN; dan
- BDK Makassar : renovasi gedung asrama (Aset Tetap Renovasi)

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

Akun	Belanja Modal Lainnya	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
536111	Belanja Modal Lainnya	53.924.205	1.936.996.876	(1.883.072.671)	(97,22)
	Jumlah Bruto	53.924.205	1.936.996.876	(1.883.072.671)	(97,22)
	Pengembalian Belanja	-	-	-	
	Jumlah Neto	53.924.205	1.936.996.876	(1.883.072.671)	(97,22)

Tabel 25 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 (Aset Tetap Lainnya)

Uraian		Nilai (Rp)
Belanja Modal Lainnya		37.964.082
Mutasi:		
	Pembelian	37.964.082
	Pengembangan langsung	-
	Perolehan KDP	-
	Pengembangan KDP	-

Uraian	Nilai (Rp)
Total Mutasi Aset	37.964.082
Selisih	-

Tabel 26 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 (Aset Tak Berwujud)

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Modal Lainnya	15.960.123
Mutasi:	
Pembelian	15.960.123
Pengembangan langsung	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Total Mutasi Aset	15.960.123
Selisih	-

B.6 Belanja Badan Layanan Umum

Belanja Badan Layanan Umum di BPPK hanya dimiliki oleh PKN STAN. Realisasi Belanja BLU Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.635.894.865 dan Rp19.377.109.197. Realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.741.214.332 atau 8,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan Belanja BLU terutama disebabkan menurunnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 yang berasal dari penurunan honorarium pewawancara SPMB PKN STAN karena pada tahun 2024 tidak ada prosedur wawancara khusus dan pengecekan latar belakang calon mahasiswa, dan menurunnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang pada tahun sebelumnya terdapat renovasi toilet dan gedung. Belanja Modal BLU Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.834.271.316 yang digunakan untuk AC Standing, layar LED Videotron, renovasi Gedung A, lampu, sarana penunjang pembelajaran, dan mesin air minum.

Perbandingan antara realisasi Belanja BLU Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja BLU Tahun 2024 dan Tahun 2023

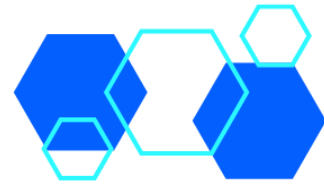
Akun	Belanja BLU	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.757.920.000	1.519.676.500	238.243.500	15,68
525112	Belanja Barang	4.141.574.262	2.322.858.719	1.818.715.543	78,30
525113	Belanja Jasa	5.378.025.112	8.012.680.249	(2.634.655.137)	(32,88)

Akun	Belanja BLU	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rupiah	%
525115	Belanja Perjalanan	2.030.891.381	2.532.865.170	(501.973.789)	(19,82)
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	493.212.794	28.157.500	465.055.294	1.651,62
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.081.193.034	747.568.000	1.333.625.034	178,40
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.753.078.282	4.213.303.059	(2.460.224.777)	(58,39)
	Jumlah Bruto	17.635.894.865	19.377.109.197	(1.741.214.332)	(8,99)
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Neto	17.635.894.865	19.377.109.197	(1.741.214.332)	(8,99)



C. NERACA





C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Pada Badan Layanan Umum

*Kas Pada Badan
Layanan Umum
Rp91.883.693.150*

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp91.883.693.150 dan Rp133.961.168.746. Saldo tersebut mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, uang muka kerja, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Administrasi Keuangan BLU PKN STAN yang sumbernya berasal dari penerimaan kegiatan operasional BLU.

Rincian saldo Kas pada Badan Layanan Umum STAN per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
Kas dan Bank – BLU	13.883.693.150
Setara Kas Lainnya – BLU	78.000.000.000
JUMLAH	91.883.693.150

Pada tanggal neraca PKN STAN memiliki 3 (tiga) deposito berjangka sebagai berikut:

- Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 12 Juni 2024 senilai Rp37.000.000.000 dengan tingkat bunga 6,10% per 31 Desember 2024,
- Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 13 Juni 2024 senilai Rp30.000.000.000 dengan tingkat bunga 6,00% per 31 Desember 2024,
- Deposito Berjangka 1 bulan pada Bank BRI dengan tanggal penempatan 27 Juni 2024 senilai Rp11.000.000.000 dengan tingkat bunga 5,50% per 31 Desember 2024.

C.2 Investasi Jangka Pendek—Badan Layanan Umum

*Investasi Jangka
Pendek—Badan
Layanan Umum
Rp52.000.000.000*

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Saldo Investasi Jangka Pendek—BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.000.000.000 dan Rp 0. Investasi tersebut merupakan deposito berjangka 6 bulan pada Bank BSI dengan tanggal penempatan 14 Juni 2024 senilai Rp52.000.000.000 dengan tingkat bunga 6,25% per 31 Desember 2024.

C.3 Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja dibayar di Muka Rp24.808.463

Belanja dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp24.808.463 dan Rp0. Belanja dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 berasal dari pengakuan atas saldo voucher BBM yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran dan belum didistribusikan. Pencatatan ini sebagai tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2023. Saldo *voucher* BBM yang sampai dengan akhir periode pelaporan masih tersisa, dicatat sebagai Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) sesuai dengan Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Kementerian Keuangan BA 015 vol. 001 hal Penggunaan Akun Belanja Barang Terkait Obat-Obatan dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tabel 29 Rincian Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) per 31 Desember 2024

Nama Satker	Saldo (Rp)
BPPK (Pusat)	500.000
PKN STAN	21.750.000
BKD Medan	2.400.000
BKD Balikpapan	158.463
Total	24.808.463

C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp726.497.942

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah yang telah muncul namun pembayarannya belum diterima pada saat periode pelaporan. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp726.497.942 dan Rp557.592.506. Saldo per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari pendapatan jasa layanan bank dan pendapatan pendidikan BLU PKN STAN.

Tabel 30 Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024

Nama Akun	Saldo (Rp)	Nama Debitur/Kegiatan
Pendapatan Jasa Layanan Bank	364.254.794	Perbankan
Pendapatan Pendidikan	77.805.144	Kabupaten Natuna
Pendapatan Pendidikan	3.530.288	Kota Cirebon
Pendapatan Pendidikan	116.707.716	Kota Tangerang Selatan
Pendapatan Pendidikan	50.600.000	Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah Batch 6 - Makassar
Pendapatan Pendidikan	50.600.000	Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah Batch 10 - Makassar
Pendapatan Pendidikan	63.000.000	Pelatihan Manajemen Aset Batch 3 - RDTL
Total	726.497.942	

C.5 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp732.405.591*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp732.405.591 dan Rp719.844.557. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 31 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024

No.	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)	Nama Satker	Status
1	CV Kautsar	7.219.940	BPPK Pusat	Macet
2	PT Asuransi Raya	17.422.020	BPPK Pusat	Macet
3	CV Putri Mahakam Kalisamarindo	60.245.022	PKN STAN	Macet
4	CV Srikandi	411.146.280	BDK Pekanbaru	Macet
5	CV Sinar	14.639.598	BDK Manado	Macet
6	PT Nugraha Adi Taruna	180.670.410	PKN STAN	Macet
7	CV Torbage Artha Nugraha	22.384.170	BPPK Pusat	Lancar
8	CV Mitra Jaya Wardani	1.652.400	BPPK Pusat	Lancar
9	CV. Ari Duta Lestari	17.025.751	BDK Pontianak	Lancar
	Total	732.405.591		

Penjelasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah berikut ini.

- Piutang pada BPPK Pusat dengan Debitur a.n. CV Kautsar telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-24/PUPNC.10.05/2012 tanggal 07 Maret 2012. Berdasarkan Nota Dinas dari KPKNL Jakarta V nomor ND-114/WKN.07/KNL.05/2022 Debitur a.n. CV Kautsar telah diterbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

- sesuai dengan nomor PSBDT-157/PUPNC.10.05/2018 tanggal 27 November 2018. Piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-35/PP/2022 tanggal 11 Maret 2022. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui S-97/MK.1/2022 tanggal 15 April 2022.
- b. Piutang pada BPPK Pusat (Unit Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial) dengan Debitur a.n. Asuransi Raya telah diterima cicilan pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nilai Rp7.466.580 dengan bukti penerimaan negara NTPN F37473CIEOI49G0F. Telah dilakukan FGD Tindak Lanjut Piutang yang Tidak Dapat Diselesaikan pada tanggal 25 Mei 2022 karena debitur sudah dilikuidasi. Kesimpulannya akan diusulkan penetapan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO). Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu atas piutang tersebut. Telah ditetapkan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) atas piutang tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-80/MK.1/2024 tanggal 9 Juni 2024.
- c. Piutang pada Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Debitur a.n. CV Putri Mahakam Kalisamarindo telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-6/PUPNC.10.05/2021 tanggal 18 Februari 2021. Berdasarkan konfirmasi dari KPKNL Jakarta V, pengurusan piutang terakhir adalah penerbitan Surat Paksa Nomor SP-420/PUPNC.10.00/2022 tanggal 16 Desember 2022.
- d. Piutang pada BDK Pekanbaru dengan Debitur a.n. CV Srikandi telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-03/PUPNC.0301/2018 tanggal 26 Oktober 2018. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-1/PUPNC.03.01/2024 tanggal 5 Januari 2024. Piutang tersebut telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-5/PP/2022 tanggal 10 Januari 2024.
- e. Piutang pada BDK Manado dengan Debitur a.n. CV Sinar telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-02/PUPNC.26.01/2012 tanggal 21 Februari 2012. Berdasarkan Nota Dinas dari BDK Manado nomor ND-1167/BPP.11/2022, piutang ini telah diterbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan surat nomor PSBDT-59/PUPNC.26.01/2022 tanggal 28 November 2022. Piutang tersebut telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-230/PP/2022 tanggal 25 Desember 2022 dan Biro Perencanaan

dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

- f. Piutang dengan Debitur a.n. PT Nugraha Adi Taruna telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-4/PUPNC.14.03/2016 tanggal 12 Oktober 2016. Berdasarkan Nota Dinas dari KPKNL Tangerang II nomor ND-255/KNL.0603/2023 tanggal 10 Maret 2023 Debitur a.n. PT Nugraha Adi Taruna telah diterbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan nomor PSBDT-1/PUPNC.14.03/2023 tanggal 27 Februari 2023. Piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-45/PP/2023 tanggal 3 April 2023. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui S-151/MK.1/2023 tanggal 20 Juni 2023.
- g. Piutang atas nama CV Torbage Artha Nugraha dan CV Mitra Jaya Wardani merupakan piutang yang muncul akibat kelebihan volume pekerjaan renovasi asrama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan senilai Rp22.384.170 serta kelebihan volume pekerjaan konstruksi pada Pusdiklat Pajak senilai Rp1.652.400. Keduanya merupakan konsep hasil Audit PDTT Pengelolaan BMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Satuan Kerja BPPK (Pusat) pada TA 2024.
- h. Piutang atas nama CV. Ari Duta Lestari merupakan piutang yang timbul akibat adanya komponen pekerjaan Pengadaan Instalasi *Fire Hydrant* di BDK Pontianak yang belum dilaksanakan sampai dengan akhir masa pemeliharaan senilai Rp22.525.751. Pengembalian pembayaran tahap pertama senilai Rp5.500.000 telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2024.

C.6 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp702.507.788

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp702.507.788 dan Rp353.337.500. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 32 Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024

No	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)	Status
1	Pemerintah Daerah – Mahasiswa Prodig I OC PBB	201.257.500	Macet
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan – Mahasiswa Pembibitan (semester 1)	152.080.000	Macet
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan – Mahasiswa Pembibitan (semester 2)	152.080.000	Macet
4	Kabupaten Timor Tengah Selatan – Mahasiswa Pembibitan (semester 3)	41.480.000	Kurang Lancar
5	Provinsi Papua Barat Daya – Mahasiswa Pembibitan (semester 1)	155.610.288	Kurang Lancar
	Jumlah	702.507.788	

Penjelasan Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Mahasiswa Prodig I OC PBB adalah piutang atas kerja sama pendidikan dengan beberapa pemerintah daerah. Kepada pemda-pemda yang merupakan debitur ini, PKN STAN telah melakukan penagihan sebanyak 3 kali. Surat penagihan ketiga telah dikirimkan kepada debitur pada April 2023.

Tabel 33 Rincian Debitur Mahasiswa Prodig I OC PBB

No	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)
1	Kabupaten Mamuju Utara	59.400.000
2	Kabupaten Probolinggo	29.700.000
3	Kabupaten Ngada	41.400.000
4	Kabupaten Muna	29.700.000
5	Kabupaten Nias Utara	11.350.000
6	Kabupaten Halmahera Timur	29.700.000
	Jumlah	201.250.000

- b. Piutang milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan piutang atas layanan pendidikan program pembibitan senilai Rp152.080.000 pada semester 1, Rp152.080.000 pada semester 2, dan Rp41.480.000 pada semester 3. PKN STAN telah melakukan penagihan melalui S-1697/PKN/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyampaian Biaya Pendidikan Kerja Sama Program Pembibitan. Kemudian PKN STAN telah menerbitkan surat penagihan kedua melalui S-74/PKN/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Biaya Pendidikan Kerja Sama Program Pembibitan. Sampai dengan tanggal pelaporan, debitur belum melakukan pembayaran.

- c. Piutang milik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merupakan piutang atas layanan pendidikan program pembibitan senilai Rp155.610.288.

C.7 Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum

*Piutang dari Kegiatan
Non Operasional
Badan Layanan
Umum
Rp286.664.703*

Saldo Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp286.664.703. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34 Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024

No	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)	Status
1	PT Sarana Karya Jasa	286.664.703	Macet
	Jumlah	286.664.703	

Piutang dari PT Sarana Karya Jasa yang telah dikategorikan macet proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan surat PUPN Nomor: SP3N-25/PUPNC.10.05/2012 tanggal 9 April 2012. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-70/PUPNC.10.05/2023 tanggal 18 Desember 2023. Piutang tersebut telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-31/PP/2022 tanggal 8 Februari 2024.

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp1.503.339.814*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.503.339.814 dan Rp1.180.168.379. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 35 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	41.062.321	0,5%	205.312
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	691.343.270	100%	691.343.270
Jumlah	732.405.591		691.548.582
Piutang Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	-	05%	-
Kurang Lancar	197.090.288	10%	19.709.029
Diragukan	-	50%	-
Macet	505.417.500	100%	505.417.500
Jumlah	702.507.788		525.126.529
Piutang Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar	-	05%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	286.664.703	100%	286.664.703
Jumlah	286.664.703		286.664.703
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.721.578.082		1.503.339.814

C.9 Persediaan

Persediaan
Rp3.125.979.838

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.125.979.838 dan Rp3.343.125.041. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 36 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Barang Konsumsi	2.622.789.452	2.722.262.876
Bahan untuk Pemeliharaan	199.022.323	368.528.293
Persediaan Lainnya	304.168.063	252.333.872
Total	3.125.979.838	3.343.125.041

Persediaan di BPPK digunakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, operasional perkantoran, serta penggunaan obat-obatan poliklinik. Penggunaan persediaan terbesar antara lain alat tulis kantor lainnya, alat/bahan

untuk kegiatan kantor lainnya, tinta/toner printer, alat tulis, buku tulis, obat padat (barang konsumsi), serta perlengkapan penunjang kegiatan kantor lainnya.

Mutasi persediaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Mutasi Nilai Persediaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	3.343.125.041
Penambahan:	5.906.941.632
Pembelian	5.870.316.913
Reklasifikasi Masuk	32.420.469
Transfer Masuk Likuidasi UAKPB	4.204.250
Pengurangan:	(6.124.086.835)
Habis Pakai	(6.005.371.352)
Hasil Opname Fisik	(62.610.256)
Transfer Keluar Likuidasi UAKPB	(4.204.250)
Usang	(19.480.508)
Reklasifikasi Keluar	(32.420.469)
Saldo per 31 Desember 2024	3.125.979.838

Mutasi tambah berasal dari pembelian, reklasifikasi masuk, dan transfer masuk likuidasi UAKPB. Untuk mutasi kurang berasal habis pakai, hasil opname fisik, transfer keluar likuidasi UAKPB, usang, dan reklasifikasi keluar. Untuk mutasi transfer masuk/keluar likuidasi UAKPB persediaan berasal dari likuidasi Balai Diklat Kepemimpinan yang diterima oleh Sekretariat BPPK sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Rincian persediaan sebagaimana tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Tanah

Tanah
Rp5.869.685.586.420

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPPK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yaitu masing-masing sebesar Rp5.869.685.586.420 dan Rp5.872.378.852.000. Mutasi tanah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 38 Mutasi Nilai Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.872.378.852.000
Mutasi tambah:	184.917.401.420
Likuidasi Masuk	183.886.167.000
Perolehan Lainnya	1.031.234.420
Mutasi kurang:	(187.610.667.000)
Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	-
Transfer Keluar	(3.724.500.000)

Uraian	Nilai (Rp)
Likuidasi Keluar	(183.886.167.000)
Saldo per 31 Desember 2024	5.869.685.586.420
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.869.685.586.420

Selama tahun 2024, mutasi tambah di BPPK berasal dari likuidasi masuk dan perolehan lainnya. Sedangkan untuk mutasi kurang berasal dari transfer keluar, likuidasi keluar, serta terdapat koreksi perubahan kuantitas (tidak berpengaruh terhadap nilai aset). Likuidasi keluar merupakan transaksi sehubungan likuidasi Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp183.886.167.000 dan diterima oleh Sekretariat BPPK sebagai likuidasi masuk. Kemudian terdapat penambahan tanah yang merupakan perolehan lainnya pada BDK Pekanbaru. Kemudian untuk transaksi transfer keluar merupakan transaksi transfer tanah bangunan rumah negara senilai Rp3.724.500.000 ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang sesuai dengan BAST nomor BA-29/BC.01/2024,BA-69/PP.1/2024 tanggal 12 Desember 2024.

BPPK memiliki tanah yang berlokasi di Cirebon. Saat ini, pencatatan aset tanah di Cirebon telah sesuai antara luas yang tercatat dalam aplikasi SIMAN dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Terkait komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk mengganti tanah seluas 415 m² sebagai konsekuensi dari pengembangan wilayah Sungai Cimanuk (berdasarkan Surat Wali Kota Cirebon Nomor 2034/Pm.014.1/1984 tanggal 7 November 1984), berikut adalah upaya-upaya yang telah ditempuh dalam rangka menindaklanjuti hal dimaksud:

- Tidak ditemukan bukti-bukti dokumen terkait hal-hal yang terjadi diantara tahun 1984 s.d. 2016;
- Pada tahun 2016, Sekretaris BPPK telah mengirimkan surat kepada walikota Cirebon S-834/PP.1/2016 tanggal 21 Juli 2016 hal Permohonan Data dan Informasi terkait Tanah Pengganti Bagi BPPK Kementerian Keuangan yang ditindaklanjuti dengan menghadiri undangan rapat nomor 005/1260-Adm.Pem.Um tanggal 18 Agustus 2016 hal Undangan Sekretaris Daerah Kota Cirebon tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Masalah Tanah Pengganti BDK Cirebon yang terkena pembebasan tanggul sungai Cimanggu tahun 1984 di Jalan Pemuda Cirebon.
- Pada tahun 2019, Sekretaris BPPK kembali bersurat kepada PD Pembangunan Kota Cirebon S-116/PP.1/2019 tanggal 26 Juni 2019 hal Kelanjutan Pembahasan Masalah Tanah Pengganti BDK Cirebon, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

- d. Pada tahun 2022, Sekretaris BPPK kembali bersurat kepada PD Pembangunan Kota Cirebon S-192/PP.1/2022 tentang Kelanjutan Pembahasan Tanah Pengganti Balai Diklat Keuangan Cirebon, tetapi sampai dengan sekarang tidak mendapatkan tanggapan.

C.11 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp457.979.790.555

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp457.979.790.555 dan Rp423.594.922.495. Mutasi nilai peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 39 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	423.594.922.495
Mutasi tambah:	79.586.830.119
Pembelian	48.839.554.492
Likuidasi Masuk	11.542.837.858
Internal Transfer Masuk	9.523.422.002
Transfer Masuk	6.781.586.105
Reklasifikasi Masuk	1.594.650.000
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	421.011.362
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	351.510.500
Saldo Awal	273.828.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	243.949.800
Pembatalan Penghapusan	7.480.000
Perolehan Lainnya	7.000.000
Mutasi Kurang:	(45.201.962.059)
Koreksi Susulan	(164.341.800)
Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(209.749.920)
Hibah Keluar	(1.327.677.840)
Reklasifikasi Keluar	(1.594.650.000)
Transfer Keluar	(3.911.403.814)
Internal Transfer Keluar	(9.523.422.002)
Likuidasi Keluar	(11.542.837.858)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(16.927.878.825)
Saldo per 31 Desember 2024	457.979.790.555
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(368.385.045.081)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	89.594.745.474

Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Rincian mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian, likuidasi masuk, internal transfer masuk, transfer masuk, reklasifikasi masuk,

reklasifikasi KDP menjadi barang jadi, penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif, saldo awal, pengembangan nilai aset (langsung), pembatalan penghapusan, dan perolehan lainnya.

Pembelian peralatan dan mesin sejumlah 7.940 unit terdiri dari alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bantu, alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, alat kantor, alat kedokteran, alat khusus kepolisian, alat komunikasi, alat pengolahan, alat rumah tangga, alat studio, komputer unit, peralatan komputer, peralatan olah raga, peralatan pemancar, rambu-rambu lalu lintas darat, unit alat laboratorium, dan unit peralatan proses/produksi. Likuidasi masuk diterima oleh Sekretariat BPPK dari Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024 terdiri dari 2.617 unit alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bengkel tak bermesin, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, komputer unit, peralatan komputer, dan peralatan olah raga.

Internal transfer keluar dan internal transfer masuk peralatan dan mesin merupakan transaksi antara satker induk dengan anak satker terdiri dari 577 unit alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bengkel tak bermesin, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komputer unit, dan peralatan komputer.

Terdapat transfer masuk di BPPK yang terdiri dari 328 unit alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bantu, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komputer unit, peralatan komputer, dan peralatan olah raga. Untuk reklasifikasi masuk terdiri dari 229 unit alat rumah tangga dan komputer unit. Mutasi reklasifikasi KDP menjadi barang jadi terdiri dari 128 unit alat kantor, alat rumah tangga, dan rambu-rambu lalu lintas darat. Selain itu mutasi tambah yang berasal dari penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif (60 unit alat studio), saldo awal (36 unit alat rumah tangga), pengembangan nilai aset langsung (alat angkutan darat bermotor), pembatalan penghapusan (2 unit alat komunikasi), dan perolehan lainnya (1 unit alat bengkel tak bermesin).

Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

Rincian mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin berasal dari koreksi susulan, penghapusan reklasifikasi dari intra ke ekstra, hibah keluar, reklasifikasi keluar, transfer keluar, internal transfer keluar, likuidasi keluar, dan penghentiaan aset dari penggunaan.

Koreksi susulan dilakukan terhadap alat rumah tangga. Penghapusan reklasifikasi dari intra ke ekstra terdiri dari 120 unit alat rumah tangga. Hibah keluar terdiri atas 572 unit alat kantor, alat rumah tangga, dan komputer unit yang diserahkan ke beberapa lembaga/yayasan sosial. Reklasifikasi keluar terdiri dari 229 unit alat rumah tangga dan komputer unit. Transfer keluar terdiri dari 901 unit alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bantu, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komputer unit, peralatan komputer, dan peralatan olah raga ke beberapa satker, baik di lingkungan BPPK maupun ke unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Internal transfer keluar peralatan dan mesin merupakan transaksi antara satker induk dengan anak satker sebagaimana telah dijelaskan pada mutasi internal transfer masuk diatas. Likuidasi keluar berasal dari Balai Diklat Kepemimpinan yang ditransfer ke Sekretariat BPPK sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Terakhir, terdapat penghentian aset dari penggunaan atas 2.830 unit alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat bantu, alat kantor, alat kedokteran, alat khusus kepolisian, alat komunikasi, alat rumah tangga, alat SAR, alat studio, komputer unit, peralatan komputer, peralatan olah raga, dan peralatan pemancar. Terdapat mutasi berupa pencatatan BMN hilang (Laptop) pada PKN STAN dengan NUP 404 dan NUP 450. Atas kedua BMN tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi dan telah disetor ke kas negara. Atas hal tersebut akan diproses lebih lanjut untuk proses penghapusan BMN pada tahun 2025.

C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp1.442.091.147.824

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.442.091.147.824 dan Rp1.271.841.746.848. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 40 Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.271.841.746.848
Mutasi tambah:	231.808.277.507
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	138.382.402.854
Likuidasi Masuk	33.998.114.807
Pengembangan Melalui KDP	26.268.499.950
Reklasifikasi Masuk	23.724.832.402

Uraian	Nilai (Rp)
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	8.051.508.681
Koreksi Susulan	938.877.267
Penyelesaian Pembangunan Langsung	385.463.040
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	58.578.506
Mutasi Kurang:	(61.558.876.531)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(487.825.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.113.849.496)
Transfer Keluar	(2.234.254.826)
Reklasifikasi Keluar	(23.724.832.402)
Likuidasi Keluar	(33.998.114.807)
Saldo per 31 Desember 2024	1.442.091.147.824
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(260.776.957.223)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.181.314.190.601

Rincian Mutasi Tambah atas Gedung dan Bangunan

Rincian mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP, likuidasi masuk, pengembangan melalui KDP, reklasifikasi masuk, pengembangan nilai aset (langsung), koreksi susulan, penyelesaian pembangunan langsung, dan koreksi pencatatan nilai bertambah. Terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan yang berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP yang terdiri dari 18 unit bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu/tanda batas. Likuidasi masuk diterima oleh Sekretariat BPPK dari Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024 terdiri dari 27 unit bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu/tanda batas. Pengembangan melalui KDP dilakukan terhadap bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu/tanda batas.

Reklasifikasi masuk terdiri dari 8 unit bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Pengembangan nilai aset (langsung) dilakukan terhadap bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu/tanda batas. Koreksi susulan dilakukan terhadap bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Kemudian terdapat transaksi penyelesaian pembangunan langsung atas bangunan gedung tempat kerja dan koreksi pencatatan nilai bertambah atas bangunan gedung tempat tinggal.

Rincian Mutasi Kurang atas Gedung dan Bangunan

Rincian mutasi kurang atas gedung dan bangunan terdiri dari penghentian aset dari penggunaan, koreksi pencatatan nilai berkurang, transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan likuidasi keluar.

Penghentian aset dari penggunaan terdiri dari 3 unit bangunan gedung tempat kerja. Koreksi pencatatan nilai berkurang dilakukan terhadap bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Transfer keluar terdiri dari 7 unit bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu/tanda batas kepada KPPBC Magelang sesuai dengan BAST nomor BA-29/BC.01/2024, BA-69/PP.1/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Adapun untuk reklasifikasi keluar terdiri dari 8 unit bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Selanjutnya, terdapat likuidasi keluar dari Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024 atas 27 unit bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu/tanda batas.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp9.460.577.055

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.460.577.055 dan Rp9.982.747.879.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 41 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.982.747.879
Mutasi tambah:	618.500.174
Likuidasi Masuk	266.765.426
Internal Transfer Masuk	240.665.426
Transfer Masuk	73.105.240
Pembelian	37.964.082
Mutasi Kurang:	(1.140.670.998)
Transfer Keluar	(25.550.000)
Internal Transfer Keluar	(240.665.426)
Likuidasi Keluar	(266.765.426)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(607.690.146)
Saldo per 31 Desember 2024	9.460.577.055
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(402.543.950)

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	9.058.033.105

Rincian Mutasi Tambah dan Kurang atas Aset Tetap Lainnya

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya berasal dari likuidasi masuk, internal transfer masuk, transfer masuk, dan pembelian. Likuidasi masuk berasal dari Balai Diklat Kepemimpinan terdiri dari 1.409 unit bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Internal transfer masuk merupakan transaksi antara anak satker dan satker induk, terdiri dari 1.406 unit bahan perpustakaan tercetak. Transfer masuk terdiri dari 185 unit bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian. Selain itu terdapat mutasi tambah yang berasal dari pembelian 123 unit bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian.

Adapun untuk mutasi kurang berasal dari transfer keluar, internal transfer keluar, likuidasi keluar, dan penghentian aset dari penggunaan. Transfer keluar terdiri dari 2 unit barang bercorak kesenian. Internal transfer keluar merupakan transaksi antara anak satker dengan satker induk sebagaimana penjelasan di atas. Likuidasi keluar dilakukan oleh Balai Diklat Kepemimpinan. Penghentian aset dari penggunaan terdiri dari 8.719 unit alat bercorak kebudayaan, bahan perpustakaan tercetak, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp113.339.708.331

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp113.339.708.331 dan Rp12.315.575.728 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin dalam pengerjaan belum (selesai sampai dengan tanggal neraca).

Tabel 42 Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	12.315.575.728
Mutasi tambah:	283.629.797.444
Pengembangan KDP	262.754.329.753
Koreksi Nilai KDP Bertambah	13.758.675.577
Perolehan/Penambahan KDP	3.440.411.497
Perolehan Lainnya KDP	2.834.357.893
Reklasifikasi Masuk KDP	842.022.724

Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Kurang:	(182.605.664.841)
Koreksi Pencatatan KDP	(306.933.412)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(421.011.362)
Reklasifikasi Keluar KDP	(842.022.724)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(16.384.794.539)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(164.650.902.804)
Saldo per 31 Desember 2024	113.339.708.331

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat penambahan KDP yang berasal dari pengembangan KDP, koreksi nilai KDP bertambah, perolehan/penambahan KDP, perolehan lainnya KDP, dan reklasifikasi masuk KDP. Mutasi kurang KDP berasal dari transaksi koreksi pencatatan KDP, penyelesaian pembangunan dengan KDP, reklasifikasi keluar KDP, koreksi nilai KDP berkurang, dan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi .

Rincian KDP di BPPK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 43 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Satker	Saldo KDP (Rp)	Keterangan
PKN STAN	110.593.331.882	Pembangunan asrama (MYC)
BKD Cimahi	2.746.376.449	Renovasi rumah negara
Jumlah	149.795.653.980	

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp629.564.546.254

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp629.564.546.254 dan Rp572.480.007.006.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 44 Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Rincian	Nilai per 31 Desember 2024(Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku Setelah Penyusutan (Rp)
1	Tanah	5.869.685.586.420	-	5.869.685.586.420
2	Peralatan dan Mesin	457.979.790.555	(368.385.045.081)	89.594.745.474
3	Gedung dan Bangunan	1.442.091.147.824	(260.776.957.223)	1.181.314.190.601
4	Aset Tetap Lainnya	9.460.577.055	(402.543.950)	9.058.033.105

No	Rincian	Nilai per 31 Desember 2024(Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku Setelah Penyusutan (Rp)
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.339.708.331	-	113.339.708.331
	Jumlah	7.892.556.810.185	(629.564.546.254)	7.262.992.263.931

C.16 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp1.563.832.241

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.563.832.241 dan Rp1.502.085.261. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 45 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR 31 Desember 2024

No.	Nama	Saldo Piutang (Rp)	Status
1	Hartadi Sutomo	63.900.000	Macet
2	Petrus P. S. Depari	1.426.257.893	Macet
3	Setyo Utomo	34.654.546	Macet
4	Ryandi Aditya	21.000.000	Macet
5	Dwi Wulandari	18.019.802	Macet
	Total	1.563.832.241	

Perubahan nilai TGR tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian nilai kurs atas nama Petrus P.S. Depari. Penjelasan atas masing-masing piutang TGR adalah sebagai berikut:

1. Hartadi Sutomo nilai TGR Rp72.000.000 telah dilakukan angsuran Rp8.100.000 kasus terkait dengan kehilangan kendaraan dinas roda empat. Pengurusannya telah dilimpahkan ke PUPN sesuai surat nomor SP3N-26/PUPNC.10.05/2009 tanggal 10 Februari 2009. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-69/PUPNC.10.05/2023 tanggal 18 Desember 2023. Piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui surat Nomor ND-55/PP/2024 tanggal 13 Maret 2024. Biro Perencanaan

- dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui S-57/MK.1/2024 tanggal 7 April 2024.
2. Petrus Pujanta Sembiring Depari nilai TGR Rp36.778.836 dan \$85.998,58 terkait dengan pegawai ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas. Pengurusannya telah dilimpahkan ke PUPN sesuai surat nomor SP3N-2015/PUPNC.05.01/2013 tanggal 30 September 2013. Hasil Konfirmasi dari KPKNL Palembang, Surat Paksa belum dapat disampaikan karena debitur tidak dapat ditemukan berdasarkan data-data yang ada. Pemberitahuan *Crash Program* Penyelesaian Piutang telah disampaikan kepada alamat rumah ybs (berdasarkan data yang ada) oleh KPKNL Palembang melalui Surat nomor S-1378/KNL.0402/2024 tanggal 7 Juni 2024. Telah dilakukan pencegahan bepergian keluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 274/KM.6/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Petrus Pujanta S. Depari.
 3. Setyo Utomo nilai TGR Rp35.200.000 telah dilakukan angsuran Rp545.454 terkait dengan kehilangan kendaraan dinas roda empat. Pengurusannya telah dilimpahkan ke PUPN sesuai surat nomor SP3N-374/PUPNC.18.03/2010 tanggal 23 Agustus 2010. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-026/PUPNC.18.03/2024 tanggal 28 Juni 2024. Piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui surat Nomor ND-134/PP/2024 tanggal 13 September 2024.
 4. Ryandi Aditya nilai TGR Rp21.000.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas. Pengurusannya telah dilimpahkan ke PUPN sesuai surat nomor SP3N-28/PUPNC.0301/2019 tanggal 23 September 2019. PUPN Cabang Riau telah menyatakan piutang tersebut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) melalui surat Nomor PSBDT-21/PUPNC.03.01/2022 tanggal 21 Juni 2022. Selanjutnya piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui surat Nomor ND-145/PP/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
 5. Dwi Wulandari nilai TGR Rp20.000.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas. Pengurusannya telah dilimpahkan ke PUPN sesuai surat nomor SP3N-441/PUPNC.10.05/2019 tanggal 9 Agustus 2019. Cicilan Pertama sebesar Rp1.980.198 telah diterima pada tanggal 10 Maret 2021. Sisa Kerugian Negara sebesar Rp18.019.802. Surat Paksa telah diterbitkan

oleh PUPN Cabang DKI Jakarta dengan nomor SP-75/PUPNC.10.00/2024 tanggal 31 Januari 2024.

C.17 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
TP/TGR
Rp1.563.832.241

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.563.832.241 dan Rp1.502.085.261. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 46 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	1.563.832.241	100%	1.563.832.241
Total	1.563.832.241		1.563.832.241

C.18 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp925.823.061

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp925.823.061. Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 47 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024

No	Nama	Saldo Piutang (Rp)	Status
1	PT Handa Panca Sakti	925.823.061	Macet
	Total	925.823.061	

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya a.n. PT Handa Panca Sakti merupakan hasil temuan dari Pemeriksaan oleh BRK-RI Tahun Anggaran 2018 No.

65.c/LHP/XV/04/2020 tanggal 26 April 2020 pada Satuan Kerja Pusdiklat PSDM untuk pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2018. Pada tahun 2022 telah dilakukan penagihan pertama sampai ketiga (10 April 2022), sehingga kualitas piutang saat ini adalah macet. Selanjutnya piutang tersebut telah dilimpahkan pengurusannya melalui Nota Dinas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-172/PP/2022 tanggal 22 September 2022 dan telah diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta melalui surat nomor SP3N-416/PUPNC.10.05/2022 tanggal 18 November 2022. Panggilan telah dilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta melalui S-3397/KNL.0705/2022 tanggal 21 November 2022.

C.19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp925.823.061

Saldo Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp925.823.061. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 48 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	925.823.061	100%	925.823.061
Total	925.823.061		925.823.061

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp9.985.336.477

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.985.336.477 dan Rp10.022.176. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 49 Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.022.176.354
Mutasi tambah:	22.054.123
Pembelian	15.960.123
Likuidasi Masuk	3.047.000
Internal Transfer Masuk	3.047.000
Mutasi Kurang:	(58.894.000)
Internal Transfer Keluar	(3.047.000)
Likuidasi Keluar	(3.047.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(52.800.000)
Saldo per 31 Desember 2024	9.985.336.477
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(8.404.227.696)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.581.108.781

Mutasi tambah aset tak berwujud berupa pembelian 1 unit software komputer sebesar Rp15.960.123. Likuidasi masuk diterima oleh Sekretariat BPPK dari likuidasi keluar Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024, terdiri dari 2 unit software. Internal transfer masuk dan internal transfer keluar merupakan transaksi antara anak satker dengan satker induk berupa 2 unit software. Untuk penghentian aset dari penggunaan terdiri atas 16 unit software.

C.21 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang dibatasi penggunaannya
Rp28.784.378.176*

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp28.784.378.176 dan Rp1.508.925.644. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya digunakan untuk mencatat Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga berasal dari penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Rincian mutasi dana yang dibatasi penggunaannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 50 Mutasi Saldo Dana di Rekening Penampungan per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal	1.508.925.644
SPM penampungan RPATA	28.784.378.176

Uraian	Nilai (Rp)
SPM pembayaran RPATA	1.508.925.644
Saldo dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN	-
Saldo akhir dana di rekening penampungan	28.784.378.176

C.22 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp3.110.347.168

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.110.347.168 dan Rp12.109.451.354. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain berasal dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan .

Uraian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 51 Mutasi Nilai Aset Lain-lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	12.109.451.354
Mutasi tambah:	18.190.179.971
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	18.076.193.971
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	13.106.000
Likuidasi Masuk Henti Guna	100.880.000
Mutasi Kurang:	(27.189.284.157)
Likuidasi Keluar Henti Guna	(100.880.000)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(351.510.500)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(25.350.115.377)
Penghapusan	(1.386.778.280)
Saldo per 31 Desember 2024	3.110.347.168
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.731.119.652)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	379.227.516

Mutasi tambah aset lain-lain berasal dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya, pencatatan pembatalan barang yang mau dihapuskan, dan likuidasi masuk henti guna. Mutasi kurang berasal dari likuidasi keluar henti guna, reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap, pencatatan barang yang mau dihapuskan, dan penghapusan.

Likuidasi masuk henti guna berasal dari Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan sesuai dengan BAST nomor BA-14/BPP.12/2024; BA-35/PP.1/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp11.135.347.348

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.135.347.348 dan Rp18.767.115.984. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No	Rincian	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	9.985.336.477	(8.404.227.696)	1.581.108.781
2	Aset Lainnya	3.110.347.168	(2.731.119.652)	379.227.516
	Jumlah	13.095.683.645	(11.135.347.348)	1.960.336.297

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp29.907.874.484

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp29.907.874.484 dan Rp2.538.012.380. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari kekurangan belanja yang belum dibayar. Terdapat prestasi pekerjaan yang telah selesai tetapi belum dilakukan pembayaran baik yang berasal dari kontrak maupun perolehan barang/jasa dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 53 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.270.673.527	Tagihan listrik, air, dan telepon Desember 2024
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	28.637.200.957	Tagihan atas kemajuan pekerjaan yang ditampung sementara pada RPATA 2024
Jumlah	29.907.874.484	

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp1.770.138.124

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.770.138.124 dan Rp321.001.531. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima/disetor ke kas Negara namun

barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 54 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	29.352.195	Pendapatan sewa kantin dan ATM yang dibayarkan untuk beberapa tahun ke depan.
Pendapatan Diterima di Muka BLU	1.736.785.929	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan untuk yang sudah dibayarkan.
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka	4.000.000	Setoran atas pendapatan TGR yang belum diperoleh SKTJM-nya.
Jumlah	1.770.138.124	

C.26 Ekuitas

Ekuitas

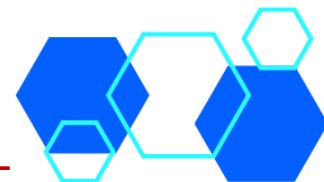
Rp7.410.038.183.457

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.410.038.183.457 dan Rp7.157.689.826.074. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas berupa selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas dapat dilihat pada huruf E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.



D. LAPORAN OPERASIONAL




D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp29.669.765.550

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp29.669.765.550 dan Rp 21.112.420.317. Perbandingan rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 55 Perbandingan Rincian PNBP 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	11.634.923.864	4.753.703.757	144,75
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.374.830.378	3.918.003.479	62,71
Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	4.360.961.882	4.297.724.068	1,47
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.078.294.215	3.253.276.947	(36,12)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	720.323.974	387.344.000	85,96
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	632.875.000	445.875.000	41,94
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	536.382.883	847.800.000	(36,73)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	297.008.843	435.619.434	(31,82)
Pendapatan Lain-lain BLU	50.752.000	7.001.721	624,85
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	6.002.703	3.800.000	57,97
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	26.692.355.742	18.350.148.406	45,46
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2.199.000.000	1.891.000.000	16,29
Pendapatan Pendidikan Lainnya	352.320.000	443.200.000	(20,51)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	256.686.407	162.154.258	58,30
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	157.635.401	206.429.213	(23,64)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	11.574.000	29.475.600	(60,73)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	194.000	30.012.840	(99,35)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.977.409.808	2.762.271.911	7,79
Total Pendapatan LO	29.669.765.550	21.112.420.317	40,53

Secara umum, Pendapatan-LO mengalami kenaikan sampai dengan 42,19% bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp26.692.355.742, naik 45,46% sekaligus menyumbang pos terbesar dari Pendapatan-LO, disusul dengan PNBP Lainnya sebesar Rp2.977.409.808 yang juga mengalami kenaikan 7,79%.

Pendapatan BLU terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang berasal dari biaya pendaftaran Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), program pembibitan dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia seperti Kabupaten Bojonegoro, Cirebon, dan Jember, serta kerja sama pendidikan

dengan Kementerian PUPR dan Republik Demokratik Timor Leste. Selain ini pendapatan Jasa Layanan Pendidikan juga berasal dari layanan terjemahan ijazah dan pendapatan denda layanan perpustakaan. Telah dilakukan penyesuaian nilai Pendapatan Jasa layanan Pendidikan berdasarkan hasil pembahasan tripartit pada tanggal 5 Mei 2025. Penyesuaian tersebut berasal dari penyesuaian nilai akrual untuk pendapatan yang telah diterima.

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU adalah pendapatan bunga dari surat berharga dengan jangka waktu 1 s.d. 3 bulan, dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu 6 bulan. Pada Tahun 2024 ini, dilakukan penempatan ulang atas beberapa deposito di PKN STAN. Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah merupakan pendapatan kerja sama pelatihan dan jasa layanan seperti kajian analisis. Kemudian terdapat beberapa pendapatan BLU dari hasil kerjasama serta terkait dengan pemanfaatan BMN.

Pendapatan PNBPN Lainnya terbesar berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya yang merupakan biaya pendaftaran sertifikasi ahli kepabeanaan pada Pusdiklat Bea dan Cukai, yaitu sebesar Rp2.199.000.000. Kemudian untuk pendapatan pendidikan lainnya berasal dari penggantian biaya pendidikan atas pengambilan transkrip nilai oleh alumni serta denda pengunduran diri alumni PKN STAN yang bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu terdapat, pendapatan PNBPN lainnya berasal dari pengenaan denda atas penyelesaian pekerjaan oleh penyedia, serta dari pemanfaatan BMN di lingkungan BPPK.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp11.419.351.780*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.419.351.780 dan Rp11.037.342.900. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan undang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan kapitalisasi. Termasuk untuk beban pegawai adalah beban pegawai PPPK.

Tabel 56 Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Uang Makan PNS	8.907.280.000	9.323.113.400	(4,46)
Beban Gaji dan Tunjangan	1.757.920.000	1.519.676.500	15,68
Beban Uang Lembur	695.837.000	194.553.000	257,66
Beban Gaji Pokok PPPK	37.164.400	-	-
Beban Uang Makan PPPK	6.300.000	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.680.000	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.716.440	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	2.886.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.824.380	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	743.288	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	272	-	-
Jumlah	11.419.351.780	11.037.342.900	3,46

Sampai dengan 31 Desember 2024 Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp382.008.880 atau 3,46% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Beban uang makan mengalami penurunan karena beberapa kegiatan sudah banyak diselenggarakan secara offline, sehingga pegawai yang melakukan perjalan (SPD) tidak dibayarkan uang makan. Kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan dikarenakan penambahan pegawai BLU. Beban uang lembur mengalami kenaikan sampai dengan 257,66% yang berasal dari pembayaran uang lembur pegawai dalam pelaksanaan tugas serta pembayaran piket bagi pegawai (tidak menggunakan belanja barang). Pada awal tahun 2024, PKN STAN mendapat tambahan pegawai satu orang PPPK, sehingga muncul beban komponen pembayaran penghasilan PPPK.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp5.471.380.746*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.471.380.746 dan Rp6.224.486.564. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 57 Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	5.075.819.872	5.729.927.404	(11,42)
Beban persediaan lainnya	395.560.874	494.559.160	(20,02)
Jumlah	5.471.380.746	6.224.486.564	(12,10)

Beban persediaan berasal dari persediaan konsumsi dan persediaan lainnya. Beban persediaan mengalami penurunan sebesar Rp753.105.818 atau turun 12,10% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Beban persediaan konsumsi terbesar berasal dari penggunaan Alat Tulis Kantor Lainnya, Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Tinta/Toner Printer, Seminar Kit, Buku Tulis, Obat Padat (Barang Konsumsi), Obat Lainnya (Persediaan Lainnya), Obat Padat (Persediaan Lainnya), Lampu Listrik dan persediaan lainnya.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa tahun
Rp312.839.813.341*

Beban Barang dan jasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp312.839.813.341 dan Rp292.370.472.835. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	142.937.614.934	122.776.790.582	16,42
Beban Keperluan Perkantoran	41.936.228.119	37.229.389.274	12,64
Beban Bahan	41.171.089.116	46.297.448.559	(11,07)
Beban Jasa Profesi	30.208.640.797	27.772.605.319	8,77
Beban Jasa Lainnya	19.507.382.905	18.806.833.804	3,72
Beban Langganan Listrik	17.191.124.990	16.120.734.073	6,64
Beban Jasa	5.378.025.112	8.012.680.249	(32,88)
Beban Sewa	4.180.154.677	4.579.641.684	(8,72)
Beban Barang	4.141.574.262	2.322.858.719	78,30
Beban Barang Operasional Lainnya	1.699.085.781	3.563.812.072	(52,32)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.469.218.429	1.094.529.175	34,23
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.416.135.575	2.356.986.785	(39,92)
Beban Langganan Air	728.212.510	604.555.039	20,45
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	493.212.794	28.157.500	1651,62
Beban Honor Output Kegiatan	174.100.000	191.125.000	(8,91)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	111.854.578	95.725.548	16,85
Beban Langganan Telepon	96.158.762	105.409.766	(8,78)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	58.578.506	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	82.479.884	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	58.303.803	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	1.240.000	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	-	267.056.000	(100,00)
Jumlah	312.839.813.341	292.370.472.835	7,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah Rp312.839.813.341, mengalami kenaikan 7% atau mencapai Rp20.469.340.506 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa terbesar berasal dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya dengan peruntukan pembayaran *allowance and tuition* beasiswa MINTS dan FETA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (akomodasi asrama eksternal, pengawas ujian, koreksi ujian, honor pelatih), pembuatan artikel, pendaftaran lomba, mitra bestari, ujian sertifikasi, jasa *Event Organizer*, pendaftaran publikasi penelitian, honorarium penyusun bahan ajar, honorarium pembimbing, akomodasi studi lapangan, penyelenggaraan *capacity building*, honor *assessor*, serta untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK.

Adapun beban keperluan perkantoran digunakan untuk membayar honorarium PPNPN (petugas kebersihan, satpam, pramubakti, pengemudi), pakaian dinas pegawai & PPNPN, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan koran dan majalah, uang lembur dan makan PPNPN, serta beberapa keperluan perkantoran lainnya. Untuk beban bahan berasal dari penyediaan konsumsi mahasiswa asrama, konsumsi pelatihan, pembelian seragam pelatihan, pembelian bahan praktikum, konsumsi *capacity building*, pembelian ATK kegiatan, penggandaan laporan, pembuatan spanduk, konsumsi rapat, serta untuk pengadaan bahan kegiatan lainnya.

Untuk beban jasa profesi berasal dari pembayaran honorarium mengajar, baik praktisi maupun pengajar eksternal & internal. Selain itu, beban jasa profesi juga berasal dari pembayaran honorarium bagi dosen tidak tetap di PKN STAN, kelebihan honor mengajar bagi dosen tetap, serta untuk pembayaran honorarium narasumber dan instruktur.

Selain itu beban barang & jasa lainnya terdiri dari beban jasa lainnya, beban langganan listrik, beban jasa, beban sewa, beban barang, beban barang operasional lainnya, beban peralatan dan mesin – ekstrakomptabel, beban honor

operasional satuan kerja, beban langganan air, beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya, beban honor output kegiatan, beban pengiriman surat dinas pos pusat, beban langganan telepon, dan beban gedung dan bangunan - ekstrakomptabel.

Pada tahun 2023 terdapat kebijakan penghentian penggunaan akun terkait Covid19 seiring dengan dicabutnya status pandemi Covid19 oleh pemerintah, sehingga di tahun 2024 tidak terdapat beban terkait dengan Covid19.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
tahun
Rp34.660.822.426

Beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp34.660.822.426 dan Rp28.118.624.417. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 59 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	30 Desember 2024 (Rp)	30 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.610.278.450	20.619.577.148	29,05
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.453.736.799	7.011.073.365	6,31
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	596.807.177	487.973.904	22,30
Jumlah	34.660.822.426	28.118.624.417	23,27

Beban Pemeliharaan berasal dari perbaikan dan pemeliharaan BMN di lingkungan BPPK agar aset yang dimiliki dapat digunakan sebagaimana mestinya. Beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.542.198.009 atau 23,27% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemeliharaan yang ada di BPPK meliputi pemeliharaan gedung kantor, asrama, halaman kantor, genset, lift, kendaraan bermotor, AC, LCD proyektor, printer, laptop, CCTV, sound system, trafo, pompa air, genset, serta untuk pemeliharaan gedung maupun peralatan dan mesin lainnya.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp22.163.693.611

Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp22.163.693.611 dan Rp25.971.670.775. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi atas pelaksanaan perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.893.859.657	14.602.411.082	2,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.407.631.356	2.041.926.323	17,91
Beban Perjalanan	2.030.891.381	2.532.865.170	(19,82)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.319.346.474	5.215.593.497	(74,70)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.105.583.618	858.443.500	28,79
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	406.381.125	720.431.203	(43,59)
Jumlah	22.163.693.611	25.971.670.775	(14,66)

Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan Rp3.807.977.164 atau 14,66% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan beban perjalanan dinas seiring dengan adanya kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Penurunan beban perjalanan dinas terbesar disumbang dari beban perjalanan dinas biasa – luar negeri yang mengalami penurunan sebesar Rp3.896.247.023.

Beban Perjalanan Dinas tersebut meliputi perjalanan dinas dalam rangka kegiatan perkuliahan, diklat, pengembangan kompetensi pegawai, mutasi dan/atau promosi, koordinasi jabatan fungsional, pelaksanaan pelatihan bagi pegawai, perjalanan dinas bagi pengajar, perjalanan dinas kegiatan studi banding, pengabdian masyarakat, dan perjalanan dinas dalam rangka penelitian dosen/mahasiswa. Selain itu beban perjalanan dinas juga berasal dari perjalanan dinas dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan negara/daerah/BUM Desa, perjalanan dinas kegiatan diseminasi/sosialisasi akreditasi, perjalanan dinas menghadiri konferensi ASSA, GDLN, uang transport pelaksanaan kegiatan mahasiswa pendidikan, perjalanan dinas dalam rangka SPMB, perjalanan dinas karyasiswa beasiswa, perjalanan dinas bagi pimpinan, perjalanan dinas dalam rangka rapim/rakor, serta beberapa perjalanan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan BPPK.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat baik pada tahun 2024 maupun 2023. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp0

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial baik pada tahun 2024 maupun 2023. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp74.749.445.061

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp74.749.445.061 dan Rp74.581.544.266. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Amortisasi mulai diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2016. Beban penyusutan dilakukan secara sistematis oleh aplikasi SAKTI pada modul Aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.541.780.761	35.882.560.464	7,41
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.780.699.160	36.751.935.488	(5,36)
Beban Amortisasi Software	1.363.495.103	1.843.436.608	(26,04)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	24.390.597	27.097.891	(9,99)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20.435.000	48.409.375	(57,79)
Beban Amortisasi Lisensi	18.644.440	28.104.440	(33,66)
Jumlah	74.749.445.061	74.581.544.266	0,23

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp384.918.414

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp384.918.414 dan (Rp12.378.625). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 62 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	323.108.629	636.650	50.651,38
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	61.746.980	(13.157.782)	(569,28)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	62.805	142.507	(55,93)
Jumlah	384.918.414	(12.378.625)	(3.209,54)

Untuk beban penyisihan BLU pelayanan pendidikan mengalami kenaikan karena salah satu Piutang dari Kegiatan Operasional BLU mengalami perubahan status kualitas piutang. Kemudian untuk beban penyisihan piutang TP/TGR mengalami perubahan sehubungan dengan penyesuaian nilai kurs. Kemudian terdapat penambahan piutang baru sehingga terdapat penambahan nilai penyisihan piutang.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp2.064.581.616

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.064.581.616 dan (Rp170.591.544). Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 63 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desemberr 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1.959.726.572	(150.357.972)	(1.403,37)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.002.075.401	1.898.388.733	58,14
Beban Pelepasan Aset non Lancar	1.042.348.829	2.048.746.705	(49,12)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	104.855.044	(20.233.572)	(618,22)
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	231.833.777	160.722.974	44,24
Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	126.978.733	180.956.546	(29,83)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	2.064.581.616	(170.591.544)	(1.310,25)

Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Pemindahtanganan BMN Lainnya masing-masing sebesar Rp2.609.402.151 dan Rp392.673.250. Adapun Beban Pelepasan aset non lancar berasal dari Beban Pelepasan Aset Rp1.042.348.829, yaitu transaksi akrual atas kerugian pelepasan aset dari nilai bukunya.

Adapun Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya berasal penyesuaian nilai kurs atas TGR, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang tahun anggaran yang lalu. Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya berasal dari beban persediaan rusak/usang dan selisih kurs (penyesuaian nilai TGR).

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak ada transaksi yang terkait dengan Pos Luar Biasa ini.

D.13 Pengungkapan LRA - LO

Sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, maka terdapat perbedaan antara laporan berbasis kas dan laporan berbasis akrual, diantaranya:

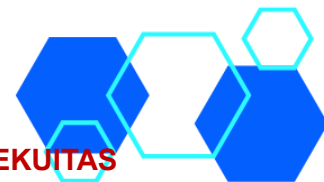
1. penyesuaian pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima;
2. adanya pelunasan piutang;
3. jurnal koreksi reklas antar beban;

4. adanya belanja modal dibawah nilai kapitalsasi;
5. jurnal akrual langganan daya jasa;
6. transaksi belanja modal dan persediaan (menjadi aset); dan
7. transaksi akrul yang tidak terkait dengan LRA.
8. Penjelasan perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) dan Laporan Operasional (basis akrual) sebagaimana terlampir.



E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS





E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp7.157.689.826.074

Nilai ekuitas awal pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.157.689.826.074 dan Rp7.177.140.299.363.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

(Rp429.955.078.213)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp429.955.078.213) dan (Rp417.349.934.359). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional surplus/defisit kegiatan non operasional sampai dengan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp48.139.415.

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0

Koreksi atas Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi atas perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar agar sesuai dengan yang seharusnya. Nilai Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.169.000.

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi Nilai Aset
Non-Revaluasi
Rp390.732.415

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi Aset tetapi bukan diakibatkan revaluasi nilai, misalnya koreksi aset atas temuan auditor reklasifikasi antar-aset yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat aset maupun penyebab koreksi nilai aset non-revaluasi lainnya. Koreksi Penilaian Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp390.732.415 dan (Rp90.950.406). Rincian transaksi Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 64 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2024

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PKN STAN	27.337.800	Koreksi kurang nilai KDP terkait kesalahan beban belanja, koreksi pengurangan nilai 12 BMN berupa sice terkait temuan BPK.
2	BDK Pekanbaru	(41.949.960)	Koreksi kurang nilai peralatan dan mesin berupa kursi yang direncanakan akan dihibahkan ke sekolah pada tahun 2025.
3	BDK Yogyakarta	(53.214.743)	Koreksi atas pengurangan masa manfaat gedung yang direnovasi (tidak terkait struktur, namun ditambahkan masa manfaatnya pada tahun 2023).
4	BDK Malang	458.559.318	Koreksi tambah nilai gedung dan peralatan dan mesin sebagai tindak lanjut <i>review</i> Itjen atas belanja pemeliharaan yang seharusnya dicatat sebagai belanja modal.
	JUMLAH	390.732.415	

Lain-lain
Rp1.919.004.719

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas Pendapatan koreksi atas Beban koreksi atas Hibah koreksi atas Piutang dan koreksi atas Kewajiban. Nilai Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.919.004.719 dan Rp0.

Transaksi Antar-
Entitas
Rp679.993.698.462

E.5 Transaksi Antar-Entitas

Transaksi Antar-Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp679.993.698.462 dan Rp397.931.103.061. Transaksi Antar-Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L antar-K/L antar-BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar-Entitas per 30 September 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 65 Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	692.832.191.922
Diterima dari Entitas Lain	(8.060.077.129)
Transfer Keluar	(214.233.635.126)
Transfer Masuk	209.455.218.795
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	-
JUMLAH	679.993.698.462

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL
Rp8.060.077.129
DKEL
Rp692.832.191.922

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar-entitas atas pendapatan dan belanja pada kementerian/lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada 31 Desember 2024 DDEL sebesar Rp8.060.077.129, sedangkan DKEL sebesar Rp692.832.191.922.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp209.455.218.795
Transfer Keluar
Rp214.233.635.126

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal kementerian/lembaga, antar-kementerian/lembaga, dan antara kementerian/lembaga dengan BA-BUN. Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp209.455.218.795 dan Rp 214.233.635.126. Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah
Langsung Rp0*

*Pengembalian
Pengesahan Hibah
Langsung Rp0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung maupun Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

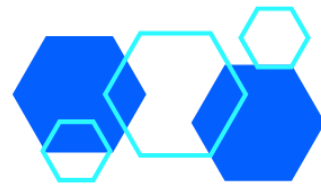
Rp7.410.038.183.457

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.410.038.183.457 dan Rp7.157.689.826.074.



F. CATATAN PENTING LAINNYA



**F. CATATAN PENTING LAINNYA**

Beberapa catatan penting lainnya merupakan informasi tambahan yang melengkapi penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* yaitu sebagai berikut.

1. Seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK telah melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN mitra, menyelesaikan *To do List* MonSAKTI, dan melakukan tutup periode permanen sampai dengan Periode 14 Tahun 2024 seluruh modul pelaporan Aplikasi SAKTI.
2. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) telah terbit sampai dengan Periode Desember 2024 untuk seluruh satuan kerja di lingkup BPPK.
3. Cetakan laporan yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) adalah cetakan yang berasal dari Aplikasi SAKTI dan rincian pendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan yang berasal dari Aplikasi MonSAKTI.
4. Telah dilakukan likuidasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebagai tindak lanjut dari PMK 135 tahun 2023 yang telah dicabut dengan PMK seluruh aset Balai Diklat Kepemimpinan ditransfer ke Sekretariat BPPK, kemudian untuk sisa anggaran di lakukan pergeseran (revisi) ke Sekretariat BPPK.
5. Terdapat 5 temuan BPK dengan 5 rekomendasi, 3 rekomendasi telah diusulkan selesai pada pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II tahun 2024.
6. Angka Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 BPPK telah sesuai dengan hasil pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (Tripartit) antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan BA015 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.
7. Realisasi Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini.

LAPORAN KINERJA UNIT ORGANISASI TAHUN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Fungsi : Pelayanan Umum dan Pendidikan
Sub Fungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri Pendidikan Kedinasan

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA BRUTO (Rp)	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
WA - Program Dukungan Manajemen								
4678 - Legislasi dan Litigasi		21.488.000	9.653.316	44,92	1	1		100,00
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	21.488.000	9.653.316	44,92	1	1	Layanan	100,00
4679 - Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum		287.498.296.000	283.180.171.724	98,50				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	659.596.000	651.774.972	98,81	47	47	Unit	100,00
EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	209.000.000	140.625.211	67,28	12	12	Dokumen	100,00
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	2.091.107.000	1.757.590.014	84,05	12	12	Layanan	100,00
EBA.105	Kerumahtanggaan	3.070.194.000	2.497.402.624	81,34	12	12	Layanan	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	71.797.351.000	69.676.356.369	97,05	12	12	Layanan	100,00
EBB.101	Kendaraan Bermotor	5.289.216.000	5.288.399.800	99,98	14	14	Unit	100,00
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	37.155.940.000	37.034.445.000	99,67	8.511	8.511	Unit	100,00
EBB.103	Gedung/Bangunan	166.502.225.000	165.692.017.508	99,51	33.057	33.057	m2	100,00
EBD.101	Dokumen Perbendaharaan Unit	216.127.000	161.195.361	74,58	1	1	Dokumen	100,00
EBD.102	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	104.948.000	72.407.096	68,99	1	1	Dokumen	85,00
EBD.103	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	164.976.000	21.923.864	13,29	1	1	Dokumen	100,00

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA BRUTO (Rp)	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
EBD.104	Laporan Keuangan Unit	17.110.000	14.142.000	82,65	1	1	Laporan	100,00
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	220.506.000	171.891.905	77,95	1	1	Layanan	67,00
4680 - Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum		150.114.687.000	148.929.200.327	99,21				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3.204.000.000	3.203.769.040	99,99	117	117	Unit	100,00
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	70.430.000	67.034.817	95,18	12	12	Layanan	100,00
EBA.105	Kerumahtanggaan	549.570.000	519.231.015	94,48	12	12	Layanan	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	32.398.392.000	32.084.471.081	99,03	12	12	Layanan	100,00
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	4.805.491.000	4.791.763.275	99,71	336	336	Unit	100,00
EBB.106	Gedung/Bangunan	109.086.804.000	108.262.931.099	99,24	12.560	12.560	m2	100,00
4681 - Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		1.043.056.000	962.670.315	92,29				
BMB.101	Jurnal BPPK	183.775.000	149.187.550	81,18	2	3	Volume	100,00
BMB.102	Corpu TV	4.724.000	1.442.000	30,52	1	1	Volume	100,00
BMB.104	Strategi Komunikasi	4.000.000	3.400.000	85,00	1	1	kegiatan	100,00
BMB.105	Pameran/Eksibisi	829.057.000	791.240.765	95,44	1	1	kegiatan	100,00
BMB.106	Publikasi Media Elektronik	21.500.000	17.400.000	80,93	1	1	Media	100,00
4682 - Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		545.934.000	438.271.184	80,28				
BMB.101	Jurnal Keuangan Negara	353.437.000	349.832.000	98,98	5	19	Volume	100,00
BMB.102	Layanan Kepustakaan	192.497.000	88.439.184	45,94	12	12	layanan	100,00
4683 - Pengelolaan Organisasi dan SDM		242.111.587.000	230.776.128.357	95,32				
AAG.101	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi	48.160.000	700.000	1,45	1	2	PerMen	100,00
AAH.101	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	64.620.000	21.247.860	32,88	1	1	peraturan	100,00
ABA.101	Kajian Akademis BPPK	760.054.000	555.016.358	73,02	27	27	Kajian	100,00
ADE.101	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara	382.349.000	207.315.719	54,22	1	1	Lembaga	100,00
DCF.101	Program dan Materi pembelajaran	1.602.120.000	945.677.123	59,03	217	414	Kegiatan	100,00
DCF.102	Pembelajaran Digital	9.380.080.000	8.714.228.218	92,90	112.915	229.818	Orang	100,00
DCF.103	Pembelajaran Klasikal	50.635.932.000	47.774.018.861	94,35	12.022	18.474	Orang	100,00

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA BRUTO (Rp)	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
DCF.104	Sertifikasi Kompetensi	1.066.419.000	985.644.636	92,43	567	2172	Orang	100,00
DCF.105	Alat Uji	804.018.000	694.406.163	86,37	8	32	Kegiatan	100,00
DCF.106	Manajemen Pengetahuan	2.093.033.000	2.005.450.816	95,82	462	586	Kegiatan	100,00
DCF.107	Karyasiswa Beasiswa	140.046.146.000	139.427.289.267	99,56	281	345	Orang	100,00
DCF.108	Regional Training Center	1.544.570.000	867.181.103	56,14	1	5	Kegiatan	100,00
DCF.309	Pembelajaran Digital terkait Managing Change : Agile and Adaptive Mindset (PU)	311.993.000	290.816.195	93,21	60.000	68.501	Orang	100,00
DCF.310	Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah (PU)	1.676.620.000	1.673.606.671	99,82	542	1.114	Orang	100,00
DCF.311	Pelatihan dalam Rangka Perluasan Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak (PU)	10.267.299.000	9.584.375.101	93,35	12.944	13.585	Orang	100,00
DCF.312	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah (PU)	522.901.000	478.781.814	91,56	294	318	Orang	100,00
DCF.313	Pembelajaran terkait Green and Sustainable Financing (PU)	185.099.000	129.539.000	69,98	700	2.116	Orang	100,00
DCF.314	Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU)	1.574.575.000	1.536.517.765	97,58	359	369	Orang	100,00
EBA.103	Penjaminan Mutu	142.697.000	600.000	0,42	1	1	Laporan	100,00
EBA.105	Learning Organization	75.260.000	67.252.761	89,36	1	1	Laporan	100,00
EBA.106	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	614.942.000	469.429.335	76,34	1	1	Rekomendasi	100,00
EBA.107	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	436.296.000	157.238.830	36,04	1	1	Rekomendasi	100,00
EBA.108	Pengelolaan Inovasi BPPK	151.255.000	82.793.009	54,74	1	1	Rekomendasi	100,00
EBA.109	AKP Kewilayahan	361.426.000	323.013.637	89,37	11	11	Rekomendasi	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	8.522.229.000	7.373.256.000	86,52	12	12	Layanan	100,00
EBC.101	Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.262.275.000	5.402.242.257	74,39	2.013	2.860	Orang	100,00
EBC.102	Administrasi Kepegawaian	358.838.000	227.213.456	63,32	1.240	1.240	Orang	100,00
EBC.103	Pengelolaan Jafung	1.220.381.000	781.276.402	64,02	353	538	Orang	100,00
4684 - Pengelolaan Organisasi dan SDM		46.586.082.000	46.172.575.461	99,11				

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA BRUTO (Rp)	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
DBA.101	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	26.552.219.000	26.383.000.263	99,36	2.225	4.178	Mahasiswa	100,00
DBA.103	Penerimaan Mahasiswa Baru	3.162.721.000	3.158.755.300	99,87	5.000	8.419	Orang	100,00
DBA.104	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	8.886.419.000	8.884.948.249	99,98	250	2.597	Orang	100,00
DBA.105	Program Pengabdian Masyarakat	888.395.000	886.097.176	99,74	50	125	Kegiatan	100,00
DBA.106	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	1.204.692.000	1.202.455.771	99,81	31	40	Penelitian	100,00
DBA.301	Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara/Daerah/BUM Desa (PU)	1.243.219.000	1.242.861.644	99,97	1.400	1.466	Orang	100,00
EBA.102	Penjaminan Mutu	37.800.000	37.477.100	99,15	1	1	Laporan	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.110.117.000	4.046.095.780	98,44	12	12	Layanan	100,00
EBC.101	Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.500.000	330.884.178	66,11	267	274	Orang	100,00
4685 - Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal		190.558.000	155.976.490	81,85				
EBD.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	190.558.000	155.976.490	81,85	1	1	Rekomendasi	100,00
4686 - Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal		88.205.000	60.115.471	68,15				
EBD.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	88.205.000	60.115.471	68,15	4	4	Rekomendasi	100,00
4687 - Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		561.442.000	460.530.742	82,03				
FAB.101	Kemenkeu Learning Center (KLC)	561.442.000	460.530.742	82,03	1	1	Sistem Informasi	100,00
TOTAL NILAI BRUTO		728.761.335.000	711.145.293.387	97,58				
PENGEMBALIAN BELANJA			(677.206.600)					
TOTAL NILAI NETO		728.761.335.000	710.468.086.787	97,49				

PERBEDAAN LRA - LO
TAHUN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No	Kode Akun	Uraian Akun	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih	Keterangan
1	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	12.554.544.481	11.634.923.864	919.620.617	jurnal balik pendapatan diterima dimuka, pengakuan pendapatan diterima dimuka dan pendapatan YMHD
2	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	864.875.000	632.875.000	232.000.000	jurnal balik pendapatan YMHD
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.108.665.831	2.078.294.215	30.371.616	jurnal manual dan penyesuaian pendapatan YMHD
4	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	4.259.761.882	4.360.961.882	(101.200.000)	pengakuan pendapatan atas pembentukan piutang
5	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.133.450.584	6.374.830.378	(241.379.794)	jurnal akrual pengakuan pendapatan jasa layanan perbankan PKN STAN
6	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	323.659.931	297.008.843	26.651.088	jurnal balik awal tahun dan pengakuan pendapatan diterima dimuka sewa ATM
7	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	218.503.738	256.686.407	(38.182.669)	Jurnal balik awal tahun dan penyesuaian atas pendapatan sewa diterima di muka
8	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	38.700.000	34.700.000	4.000.000	pengakuan utang atas setoran TGR AGAD
9	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	256.815.412	157.635.401	99.180.011	jurnal balik atas pengakuan denda yang seharusnya diterima di tahun 2023 (pendapatan YMHD)

No	Kode Akun	Uraian Akun	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih	Keterangan
10	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	40.484.509	23.045.822	17.438.687	pelunasan piutang dari penyedia ata slebih bayar pekerjaan
11	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.935.567.319	-	1.935.567.319	Pembayaran kurang vol temuan BPK, dikoreksi mengurangi nilai asetnya (koreksi AT non Revaluasi)
12	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	-	169.245.205	(169.245.205)	transaksi akrual modul piutang (penyesuaian kurs)
13	521111	Beban Keperluan Perkantoran	41.942.324.166	41.936.228.119	6.096.047	1. Setban : mereklas akun beban atas Transaksi Gantung (BAST Belum SPBy) berupa Pembelian Baterai (Persediaan) 2. BDK Balikpapan : perbedaaan RPATA dan realisasi BAST
14	521211	Beban Bahan	41.171.184.616	41.171.089.116	95.500	koreksi transaksi gantung (BAST BIm SPBy) Setban, Pekanbaru
15	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.326.292.429	1.469.218.429	(142.926.000)	pembelian permes dibawah nilai kapitalisasi (BDK Denpasar)
16	522111	Beban Langganan Listrik	17.244.334.727	17.191.124.990	53.209.737	jurnal balik akrual awal tahun dan pengakuan beban akhir tahun
17	522112	Beban Langganan Telepon	98.560.376	96.158.762	2.401.614	jurnal balik akrual awal tahun dan pengakuan beban akhir tahun
18	522113	Beban Langganan Air	721.606.368	728.212.510	(6.606.142)	jurnal balik akrual awal tahun dan pengakuan beban akhir tahun
19	522151	Beban Jasa Profesi	30.340.190.797	30.208.640.797	131.550.000	Jurnal balik tunggakkann honorarium jam mengajar BDPim
20	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.058.523.644	26.610.278.450	448.245.194	rekas dari beban ekstrakom dan transaksi gantung (BAST blm SPBy) setban serta koreksi aset tetap non reval BDK Medan
21	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.478.545.262	7.453.736.799	24.808.463	pengakuan belanja dibayar dimuka sisa voucher BBM (Setban, PKN STAN, BDK Balikpapan, BDK Medan
22	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	34.780.699.160	(34.780.699.160)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
23	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	38.541.780.761	(38.541.780.761)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA

No	Kode Akun	Uraian Akun	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih	Keterangan
24	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	20.435.000	(20.435.000)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
25	592115	Beban Amortisasi Software	-	1.363.495.103	(1.363.495.103)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
26	592116	Beban Amortisasi Lisensi	-	18.644.440	(18.644.440)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
27	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	24.390.597	(24.390.597)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
28	593111	Beban Persediaan konsumsi	-	5.075.819.872	(5.075.819.872)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
29	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	596.807.177	(596.807.177)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
30	593149	Beban persediaan lainnya	-	395.560.874	(395.560.874)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
31	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	-	62.805	(62.805)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
32	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	-	323.108.629	(323.108.629)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
33	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	61.746.980	(61.746.980)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
34	596111	Beban Pelepasan Aset	-	1.042.348.829	(1.042.348.829)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
35	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	-	19.480.508	(19.480.508)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
36	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	107.498.225	(107.498.225)	transaksi akrual, tidak terkait belanja LRA
37	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.305.821.682	-	5.305.821.682	belanja persediaan, menjadi aset lancar
38	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	106.011.096	-	106.011.096	belanja persediaan, menjadi aset lancar
39	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.974.902	-	165.974.902	belanja persediaan, menjadi aset lancar
40	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287.722.448	-	287.722.448	belanja persediaan, menjadi aset lancar
41	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.264.792.619	-	47.264.792.619	Belanja modal, menjadi aset tetap

No	Kode Akun	Uraian Akun	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih	Keterangan
42	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	243.949.800	-	243.949.800	Belanja modal, menjadi aset tetap
43	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.467.968.162	-	239.467.968.162	Belanja modal, menjadi aset tetap
44	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	32.733.902.163	-	32.733.902.163	Belanja modal, menjadi aset tetap
45	536111	Belanja Modal Lainnya	53.924.205	-	53.924.205	Belanja modal, menjadi aset tetap
46	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.081.193.034	-	2.081.193.034	Belanja modal, menjadi aset tetap
47	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.753.078.282	-	1.753.078.282	Belanja modal, menjadi aset tetap



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
SALDO AWAL TAHUN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 21/02/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	4,961,168,746	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	129,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	557,592,506	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	510,672,860	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	209,171,697	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	353,337,500	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	286,664,703	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	510,672,860
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	180,812,917
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	202,017,900
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	286,664,703
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,722,262,876	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	368,528,293	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	252,333,872	0
0.0	131111	Tanah	5,872,378,852,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	423,594,922,495	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,271,841,746,848	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,982,747,879	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12,315,575,728	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	349,491,381,836
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	222,605,966,220
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	382,658,950
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,502,085,261	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	925,823,061	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	1,502,085,261
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	925,823,061
0.0	162151	Software	8,951,747,884	0
0.0	162161	Lisensi	186,444,400	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	883,984,070	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,508,925,644	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	12,109,451,354	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,692,227,831
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,967,822,693
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	107,065,460
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,451,228,736
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,086,783,644

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 11BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 21/02/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	67,534,864
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	253,466,667
0.0	391111	Ekuitas	0	7,157,689,826,074
JUMLAH			7,755,404,039,677	7,755,404,039,677

LAMPIRAN II
NERACA PERCOBAAN AKRUAL
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	13,883,693,150	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	78,000,000,000	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	52,000,000,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	24,808,463	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	726,497,942	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	510,672,860	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	221,732,731	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	702,507,788	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	286,664,703	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	510,672,860
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	180,875,722
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	525,126,529
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	286,664,703
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,622,789,452	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	199,022,323	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	304,168,063	0
0.0	131111	Tanah	5,869,685,586,420	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	457,979,790,555	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,442,091,147,824	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,460,577,055	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	113,339,708,331	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	368,385,045,081
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	260,776,957,223
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	402,543,950
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,563,832,241	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	925,823,061	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	1,563,832,241
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	925,823,061
0.0	162151	Software	8,914,908,007	0
0.0	162161	Lisensi	186,444,400	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	883,984,070	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	28,784,378,176	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,110,347,168	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,731,119,652
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	8,278,517,796
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	125,709,900

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,270,673,527
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	28,637,200,957
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	29,352,195
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	4,000,000
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	1,736,785,929
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	692,832,191,922
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,060,077,129	0
0.0	313211	Transfer Keluar	214,233,635,126	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	209,455,218,795
0.0	391111	Ekuitas	0	7,157,689,826,074
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	390,732,415
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,919,004,719
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	11,634,923,864
3.0	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	632,875,000
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	536,382,883
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	2,078,294,215
3.0	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	4,360,961,882
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,374,830,378
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	50,752,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	720,323,974
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	297,008,843
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	6,002,703
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	11,574,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,609,402,151
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	392,673,250
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	256,686,407
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,199,000,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	352,320,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	34,700,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	157,635,401
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,842,750
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	23,045,822
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	194,000
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	169,245,205
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	8,907,280,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	37,164,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	272	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,716,440	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	743,288	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,680,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,824,380	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	6,300,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	695,837,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,886,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	41,936,228,119	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	111,854,578	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,416,135,575	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,699,085,781	0
3.0	521211	Beban Bahan	41,171,089,116	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	174,100,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	142,937,614,934	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,469,218,429	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	17,191,124,990	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	96,158,762	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	728,212,510	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,180,154,677	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	30,208,640,797	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	19,507,382,905	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26,610,278,450	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,453,736,799	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14,893,859,657	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,105,583,618	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	406,381,125	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,407,631,356	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,319,346,474	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	1,757,920,000	0
3.0	525112	Beban Barang	4,141,574,262	0
3.0	525113	Beban Jasa	5,378,025,112	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	2,030,891,381	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	493,212,794	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34,780,699,160	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38,541,780,761	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20,435,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,363,495,103	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	18,644,440	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	24,390,597	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,075,819,872	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	596,807,177	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	395,560,874	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	62,805	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	323,108,629	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	61,746,980	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,042,348,829	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	19,480,508	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	107,498,225	0
JUMLAH			8,771,561,549,979	8,771,561,549,979

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN III
NERACA PERCOBAAN KAS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	710,468,086,787
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	35,618,496,398	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	12,554,544,481
3.0	424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	864,875,000
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	536,382,883
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	2,108,665,831
3.0	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	4,259,761,882
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,133,450,584
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	50,752,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	720,323,974
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	323,659,931
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	6,002,703
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	11,574,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,609,402,151
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	392,673,250
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	218,503,738
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,199,000,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	352,320,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	38,700,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	256,815,412
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,842,750
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,484,509
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,935,567,319
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	194,000
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	8,907,280,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	37,164,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	272	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,716,440	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	743,288	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,680,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,824,380	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	6,300,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	695,837,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,886,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	41,942,655,247	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	111,854,578	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,418,540,375	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,699,085,781	0
3.0	521211	Belanja Bahan	41,177,923,166	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	174,100,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	143,136,389,831	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,326,292,429	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,305,821,682	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	106,011,096	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	17,252,012,032	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	98,560,376	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	721,606,368	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,199,974,197	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	30,348,639,797	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	19,507,382,905	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,061,088,680	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165,974,902	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,478,559,252	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287,722,448	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,323,135,478	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,106,203,618	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	406,381,725	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,408,167,356	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,319,346,474	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,757,920,000	0
3.0	525112	Belanja Barang	4,141,574,262	0
3.0	525113	Belanja Jasa	5,378,025,112	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	2,030,891,381	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	493,212,794	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,264,792,619	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	243,949,800	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239,467,968,162	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	32,733,902,163	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	53,924,205	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,081,193,034	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,753,078,282	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	331,081
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,404,800
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	6,738,550
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	198,774,897

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	7,677,305
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	19,819,520
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	8,449,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	2,565,036
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	13,990
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	429,275,821
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	620,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	600
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	536,000
JUMLAH			746,763,789,785	746,763,789,785

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TRANSAKSI KAS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 11

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 2:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	10,499,781,000	9,880,290,000	8,907,280,000	0	8,907,280,000	90.15	973,010,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	10,499,781,000	9,880,290,000	8,907,280,000	0	8,907,280,000	90.15	973,010,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	40,023,000	37,164,400	0	37,164,400	92.86	2,858,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	272	0	272	6.8	3,728
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,430,000	3,716,440	0	3,716,440	83.89	713,560
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	885,000	743,288	0	743,288	83.99	141,712
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	5,520,000	4,680,000	0	4,680,000	84.78	840,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	3,407,000	2,824,380	0	2,824,380	82.9	582,620
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	8,595,000	6,300,000	0	6,300,000	73.3	2,295,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	62,864,000	55,428,780	0	55,428,780	88.17	7,435,220
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	298,697,000	922,772,000	695,837,000	0	695,837,000	75.41	226,935,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	8,500,000	2,886,000	0	2,886,000	33.95	5,614,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	298,697,000	931,272,000	698,723,000	0	698,723,000	75.03	232,549,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,798,478,000	10,874,426,000	9,661,431,780	0	9,661,431,780	88.85	1212994220
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	43,103,398,000	42,640,009,000	41,942,655,247	331,081	41,942,324,166	98.36	697,684,834
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	104,954,000	132,795,000	111,854,578	0	111,854,578	84.23	20,940,422
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,660,754,000	1,502,040,000	1,418,540,375	2,404,800	1,416,135,575	94.28	85,904,425
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,189,618,000	1,777,146,000	1,699,085,781	0	1,699,085,781	95.61	78,060,219
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	46,058,724,000	46,051,990,000	45,172,135,981	2,735,881	45,169,400,100	98.08	882,589,900
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	52,768,907,000	43,229,329,000	41,177,923,166	6,738,550	41,171,184,616	95.24	2,058,144,384
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	454,200,000	174,550,000	174,100,000	0	174,100,000	99.74	450,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	136,513,027,000	143,593,853,000	143,136,389,831	198,774,897	142,937,614,934	99.54	656,238,066
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,174,970,000	1,348,756,000	1,326,292,429	0	1,326,292,429	98.33	22,463,571
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	190,911,104,000	188,346,488,000	185,814,705,426	205,513,447	185,609,191,979	98.55	2,737,296,021
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,727,223,000	5,809,636,000	5,305,821,682	0	5,305,821,682	91.33	503,814,318
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	161,842,000	106,011,096	0	106,011,096	65.5	55,830,904
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	6,727,223,000	5,971,478,000	5,411,832,778	0	5,411,832,778	90.63	559,645,222

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 11

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 2:19 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	16,550,098,000	17,437,079,000	17,252,012,032	7,677,305	17,244,334,727	98.89	192,744,273
522112	Belanja Langganan Telepon	99,491,000	103,359,000	98,560,376	0	98,560,376	95.36	4,798,624
522113	Belanja Langganan Air	528,771,000	777,569,000	721,606,368	0	721,606,368	92.8	55,962,632
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	3,588,000	0	0	0	0	3,588,000
522141	Belanja Sewa	4,364,900,000	4,422,287,000	4,199,974,197	19,819,520	4,180,154,677	94.52	242,132,323
522151	Belanja Jasa Profesi	29,603,485,000	32,387,823,000	30,348,639,797	8,449,000	30,340,190,797	93.68	2,047,632,203
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,698,893,000	20,928,390,000	19,507,382,905	0	19,507,382,905	93.21	1,421,007,095
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	66,845,638,000	76,060,095,000	72,128,175,675	35,945,825	72,092,229,850	94.78	3,967,865,150
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26,970,838,000	27,497,900,000	27,061,088,680	2,565,036	27,058,523,644	98.4	439,376,356
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	310,307,000	248,354,000	165,974,902	0	165,974,902	66.83	82,379,098
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,624,973,000	7,948,633,000	7,478,559,252	13,990	7,478,545,262	94.09	470,087,738
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	735,630,000	292,531,000	287,722,448	0	287,722,448	98.36	4,808,552
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	33,641,748,000	35,987,418,000	34,993,345,282	2,579,026	34,990,766,256	97.23	996,651,744
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,178,100,000	20,016,642,000	15,323,135,478	429,275,821	14,893,859,657	74.41	5,122,782,343
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,728,875,000	1,487,722,000	1,106,203,618	620,000	1,105,583,618	74.31	382,138,382
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	248,480,000	577,881,000	406,381,725	600	406,381,125	70.32	171,499,875
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,149,634,000	2,586,362,000	2,408,167,356	536,000	2,407,631,356	93.09	178,730,644
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,305,089,000	24,668,607,000	19,243,888,177	430,432,421	18,813,455,756	76.26	5,855,151,244
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,667,707,000	1,639,257,000	1,319,346,474	0	1,319,346,474	80.48	319,910,526
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	4,667,707,000	1,639,257,000	1,319,346,474	0	1,319,346,474	80.48	319,910,526
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,557,920,000	1,757,920,000	1,757,920,000	0	1,757,920,000	100	0
525112	Belanja Barang	1,829,348,000	4,142,171,000	4,141,574,262	0	4,141,574,262	99.99	596,738
525113	Belanja Jasa	6,675,615,000	5,381,674,000	5,378,025,112	0	5,378,025,112	99.93	3,648,888
525115	Belanja Perjalanan	1,403,517,000	2,032,011,000	2,030,891,381	0	2,030,891,381	99.94	1,119,619
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	600,000	493,284,000	493,212,794	0	493,212,794	99.99	71,206
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	11,467,000,000	13,807,060,000	13,801,623,549	0	13,801,623,549	99.96	5,436,451
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	381,624,233,000	392,532,393,000	377,885,053,342	677,206,600	377,207,846,742	96.1	15324546258
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,785,979,000	47,377,716,000	47,264,792,619	0	47,264,792,619	99.76	112,923,381
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	244,766,000	243,949,800	0	243,949,800	99.67	816,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 2:19 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	28,785,979,000	47,622,482,000	47,508,742,419	0	47,508,742,419	99.76	113,739,581
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243,424,083,000	240,651,934,000	239,467,968,162	0	239,467,968,162	99.51	1,183,965,838
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	25,821,600,000	33,093,654,000	32,733,902,163	0	32,733,902,163	98.91	359,751,837
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	269,245,683,000	273,745,588,000	272,201,870,325	0	272,201,870,325	99.44	1,543,717,675
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	56,175,000	53,924,205	0	53,924,205	95.99	2,250,795
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	56,175,000	53,924,205	0	53,924,205	95.99	2,250,795
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	2,086,830,000	2,081,193,034	0	2,081,193,034	99.73	5,636,966
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	1,843,441,000	1,753,078,282	0	1,753,078,282	95.1	90,362,718
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	3,930,271,000	3,834,271,316	0	3,834,271,316	97.56	95,999,684
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	298,031,662,000	325,354,516,000	323,598,808,265	0	323,598,808,265	99.46	1755707735
	JUMLAH BELANJA	690,454,373,000	728,761,335,000	711,145,293,387	677,206,600	710,468,086,787	97.49	18,293,248,213

LAMPIRAN V
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 11

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 2:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10,682,000,000	12,554,544,481	0	12,554,544,481	117.53
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	10,682,000,000	12,554,544,481	0	12,554,544,481	117.53
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum					
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	864,875,000	0	864,875,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4242	0	864,875,000	0	864,875,000	
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	536,382,883	0	536,382,883	0
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	2,108,665,831	0	2,108,665,831	0
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	4,259,761,882	0	4,259,761,882	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	6,904,810,596	0	6,904,810,596	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3,060,000,000	6,133,450,584	0	6,133,450,584	200.44
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	50,752,000	0	50,752,000	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	225,000,000	720,323,974	0	720,323,974	320.14
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	323,659,931	0	323,659,931	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	6,002,703	0	6,002,703	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	3,285,000,000	7,234,189,192	0	7,234,189,192	220.22
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	3,000,000	11,574,000	0	11,574,000	385.8
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	717,500,000	2,609,402,151	0	2,609,402,151	363.68
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	36,104,000	392,673,250	0	392,673,250	1087.62
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	79,827,000	218,503,738	0	218,503,738	273.72

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 11

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 2:19 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	836,431,000	3,232,153,139	0	3,232,153,139	386.42
4252 425289	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1,025,000,000	2,199,000,000	0	2,199,000,000	214.54
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,025,000,000	2,199,000,000	0	2,199,000,000	214.54
4254 425419	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	352,320,000	0	352,320,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	0	352,320,000	0	352,320,000	
4257 425791	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	38,700,000	0	38,700,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	38,700,000	0	38,700,000	
4258 425811	Pendapatan Denda Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	256,815,412	0	256,815,412	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	256,815,412	0	256,815,412	
4259 425911 425912 425913 425999	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Anggaran Lain-lain	0 0 0 0	4,842,750 40,484,509 1,935,567,319 194,000	0 0 0 0	4,842,750 40,484,509 1,935,567,319 194,000	0 0 0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,981,088,578	0	1,981,088,578	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	15,828,431,000	35,618,496,398	0	35,618,496,398	225.03
	JUMLAH PENDAPATAN	15,828,431,000	35,618,496,398	0	35,618,496,398	225.03

LAMPIRAN VI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 11

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,828,431,000	35,618,496,398	19,790,065,398	225.03	11,949,119,000	22,744,004,746	10,794,885,746	190.34
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	13,967,000,000	27,558,419,269	13,591,419,269	197.31	9,965,000,000	18,058,654,223	8,093,654,223	181.22
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,861,431,000	8,060,077,129	6,198,646,129	433.00	1,984,119,000	4,685,350,523	2,701,231,523	236.14
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	15,828,431,000	35,618,496,398	19,790,065,398	225.03	11,949,119,000	22,744,004,746	10,794,885,746	190.34
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	728,761,335,000	710,468,086,787	(18,293,248,213)	97.49	436,749,612,000	421,089,197,491	(15,660,414,509)	96.41
1. Belanja Pegawai	10,874,426,000	9,661,431,780	(1,212,994,220)	88.85	9,876,406,000	9,517,666,400	(358,739,600)	96.37
2. Belanja Barang	392,532,393,000	377,207,846,742	(15,324,546,258)	96.10	364,361,763,000	353,648,825,777	(10,712,937,223)	97.06
3. Belanja Modal	325,354,516,000	323,598,808,265	(1,755,707,735)	99.46	62,511,443,000	57,922,705,314	(4,588,737,686)	92.66
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 11

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	728,761,335,000	710,468,086,787	(18,293,248,213)	97.49	436,749,612,000	421,089,197,491	(15,660,414,509)	96.41
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN VII
NERACA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	91,883,693,150	133,961,168,746	(42,077,475,596)	(31.41)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	52,000,000,000	0	52,000,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	24,808,463	0	24,808,463	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	726,497,942	557,592,506	168,905,436	30.29
Piutang Bukan Pajak	732,405,591	719,844,557	12,561,034	1.74
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(691,548,582)	(691,485,777)	(62,805)	0.01
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	40,857,009	28,358,780	12,498,229	44.07
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	702,507,788	353,337,500	349,170,288	98.82
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(525,126,529)	(202,017,900)	(323,108,629)	159.94
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	177,381,259	151,319,600	26,061,659	17.22
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	286,664,703	286,664,703	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(286,664,703)	(286,664,703)	0	0.00
Persediaan	3,125,979,838	3,343,125,041	(217,145,203)	(6.50)
JUMLAH ASET LANCAR	147,979,217,661	138,041,564,673	9,937,652,988	7.20
ASET TETAP				
Tanah	5,869,685,586,420	5,872,378,852,000	(2,693,265,580)	(0.05)
Peralatan dan Mesin	457,979,790,555	423,594,922,495	34,384,868,060	8.12
Gedung dan Bangunan	1,442,091,147,824	1,271,841,746,848	170,249,400,976	13.39
Aset Tetap Lainnya	9,460,577,055	9,982,747,879	(522,170,824)	(5.23)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113,339,708,331	12,315,575,728	101,024,132,603	820.30
AKUMULASI PENYUSUTAN	(629,564,546,254)	(572,480,007,006)	(57,084,539,248)	9.97
JUMLAH ASET TETAP	7,262,992,263,931	7,017,633,837,944	245,358,425,987	3.50
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,563,832,241	1,502,085,261	61,746,980	4.11
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,563,832,241)	(1,502,085,261)	(61,746,980)	4.11
Piutang Jangka Panjang lainnya	925,823,061	925,823,061	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(925,823,061)	(925,823,061)	0	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,985,336,477	10,022,176,354	(36,839,877)	(0.37)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	28,784,378,176	1,508,925,644	27,275,452,532	1,807.61
Aset Lain-lain	3,110,347,168	12,109,451,354	(8,999,104,186)	(74.31)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(11,135,347,348)	(18,767,115,984)	7,631,768,636	(40.67)
JUMLAH ASET LAINNYA	30,744,714,473	4,873,437,368	25,871,277,105	530.86
JUMLAH ASET	7,441,716,196,065	7,160,548,839,985	281,167,356,080	3.93

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	29,907,874,484	2,538,012,380	27,369,862,104	1,078.40
Pendapatan Diterima Dimuka	1,770,138,124	321,001,531	1,449,136,593	451.44
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31,678,012,608	2,859,013,911	28,818,998,697	1,008.00
JUMLAH KEWAJIBAN	31,678,012,608	2,859,013,911	28,818,998,697	1,008.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,410,038,183,457	7,157,689,826,074	252,348,357,383	3.53
JUMLAH EKUITAS	7,410,038,183,457	7,157,689,826,074	252,348,357,383	3.53
JUMLAH EKUITAS	7,410,038,183,457	7,157,689,826,074	252,348,357,383	3.53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,441,716,196,065	7,160,548,839,985	281,167,356,080	3.93

Keterangan :
FINAL

LAMPIRAN VIII
LAPORAN OPERASIONAL
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON I

: (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 2:17 PM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,977,409,808	21,112,420,317	(18,135,010,509)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	26,692,355,742	0	26,692,355,742	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	29,669,765,550	21,112,420,317	8,557,345,233	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	29,669,765,550	21,112,420,317	8,557,345,233	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	11,419,351,780	11,037,342,900	382,008,880	-
Beban Persediaan	5,471,380,746	6,224,486,564	(753,105,818)	-
Beban Barang dan Jasa	312,839,813,341	292,370,472,835	20,469,340,506	-
Beban Pemeliharaan	34,660,822,426	28,118,624,417	6,542,198,009	-
Beban Perjalanan Dinas	22,163,693,611	25,971,670,775	(3,807,977,164)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON I

: (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 2:17 PM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	74,749,445,061	74,581,544,266	167,900,795	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	384,918,414	(12,378,625)	397,297,039	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	461,689,425,379	438,291,763,132	23,397,662,247	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(432,019,659,829)	(417,179,342,815)	(14,840,317,014)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,959,726,572	(150,357,972)	2,110,084,544	-
Pendapatan Pelepasan Aset	3,002,075,401	1,898,388,733	1,103,686,668	-
Beban Pelepasan Aset	1,042,348,829	2,048,746,705	(1,006,397,876)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	104,855,044	(20,233,572)	125,088,616	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	231,833,777	160,722,974	71,110,803	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	126,978,733	180,956,546	(53,977,813)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,064,581,616	(170,591,544)	2,235,173,160	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(429,955,078,213)	(417,349,934,359)	(12,605,143,854)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(429,955,078,213)	(417,349,934,359)	(12,605,143,854)	-

Keterangan :

FINAL

LAMPIRAN IX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

: (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 2:18 PM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,157,689,826,074	7,177,140,299,363	(19,450,473,289)	(0.27)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(429,955,078,213)	(417,349,934,359)	(12,605,143,854)	3.02
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,309,737,134	(31,641,991)	2,341,379,125	(7,399.59)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	48,139,415	(48,139,415)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	11,169,000	(11,169,000)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	390,732,415	(90,950,406)	481,682,821	(529.61)
LAIN-LAIN	1,919,004,719	0	1,919,004,719	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	679,993,698,462	397,931,103,061	282,062,595,401	70.88
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	252,348,357,383	(19,450,473,289)	271,798,830,672	(1,397.39)
EKUITAS AKHIR	7,410,038,183,457	7,157,689,826,074	252,348,357,383	3.53

Keterangan :

FINAL

3. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Eselon 1

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1)
TAHUN 2024

Kode dan Nama Eselon 1 : (01511) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	
		Seharusnya		
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	-	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	-	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	-	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	-	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	-	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	-	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	-	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	-	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	-	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	-	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	-	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	-	✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	-	-	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	-	✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	✓	-	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	✓	-	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	-	✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?	-	✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?	-	✓	Tidak

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?	-	√	Tidak
	a. Pagu/DIPA	-	√	Tidak
	b. Estimasi PNPB	-	√	Tidak
	c. Belanja	-	√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja	-	√	Tidak
	e. Pendapatan	-	√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja	-	√	Tidak
	g. Kas BLU	-	√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	√	Tidak
	i. Kas Hibah	-	√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung	-	√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	√	-	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	-	√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)	-	√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?	-	√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	-	√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?	-	√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)	-	√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual	-	√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas	-	√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal	-	√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√	-	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√	-	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√	-	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√	-	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	-	-	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√	-	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√	-	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)	-	√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	-	√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	-	√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"	-	√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	-	√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)	-	√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)	-	√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN	-	√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)	-	√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)	-	√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)	-	√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)	-	√	Tidak

	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"	-	-	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	-	-	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	-	-	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	-	-	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	-	√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI	-	√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	-	-	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	-	-	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	4.778.416.331		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	4.778.416.331		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√	-	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√	-	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	√	-	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	-	√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	-	√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	-	√	Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√	-	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√	-	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√	-	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√	-	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	-	√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√	-	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	-	√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	-	√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-	-	√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null	-	√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√	-	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	-	√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√	-	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√	-	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	-	√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP	-	√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√	-	Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√	-	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	-	√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	-	√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya	-	√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"	-	√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	-	√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	-	√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√	-	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√	-	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√	-	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√	-	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	-	√	Ya/Tidak

3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√	-	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√	-	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√	-	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?			Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√	-	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	-	√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	-	√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	-	√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√	-	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√	-	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√	-	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	√	-	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√	-	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√	-	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Joko Nugroho)		Jakarta, Februari 2025 Penelaah,  (Suryadi)		

LAMPIRAN XVI
SURAT HASIL REKONSILIASI (SHR)
LINGKUP
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 561232
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	15,717,259,000	15,717,259,000	0
2	Belanja	15,540,038,636	15,540,038,636	0
3	Pengembalian Belanja	-30,000	-30,000	0
4	Estimasi Pendapatan	9,000,000	9,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	115,753,390	115,753,390	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 622429
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,938,336,000	10,938,336,000	0
2	Belanja	10,667,188,856	10,667,188,856	0
3	Pengembalian Belanja	-2,368,000	-2,368,000	0
4	Estimasi Pendapatan	5,049,000	5,049,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	52,040,292	52,040,292	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 675741
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	145,219,281,000	145,219,281,000	0
2	Belanja	144,700,408,229	144,700,408,229	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	87,000,000	87,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 561225
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,493,905,000	3,493,905,000	0
2	Belanja	3,265,731,505	3,265,731,505	0
3	Pengembalian Belanja	-5,746,890	-5,746,890	0
4	Estimasi Pendapatan	50,000,000	50,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	85,705,549	85,705,549	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 561182
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,271,051,000	7,271,051,000	0
2	Belanja	7,058,689,455	7,058,689,455	0
3	Pengembalian Belanja	-22,629,114	-22,629,114	0
4	Estimasi Pendapatan	7,104,000	7,104,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	26,422,416	26,422,416	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 636799
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,907,864,000	5,907,864,000	0
2	Belanja	5,730,710,697	5,730,710,697	0
3	Pengembalian Belanja	-650,000	-650,000	0
4	Estimasi Pendapatan	19,500,000	19,500,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	188,546,151	188,546,151	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 561199
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,360,697,000	8,360,697,000	0
2	Belanja	8,108,486,776	8,108,486,776	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	3,000,000	3,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16,810,000	16,810,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 561204
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,662,270,000	7,662,270,000	0
2	Belanja	7,417,101,985	7,417,101,985	0
3	Pengembalian Belanja	-90,000	-90,000	0
4	Estimasi Pendapatan	100,000	100,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	14,582,743	14,582,743	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 675720
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,702,633,000	8,702,633,000	0
2	Belanja	8,105,131,818	8,105,131,818	0
3	Pengembalian Belanja	-770,700	-770,700	0
4	Estimasi Pendapatan	8,000,000	8,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	42,364,000	42,364,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 477198
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	197,334,908,000	197,334,908,000	0
2	Belanja	195,600,162,443	195,600,162,443	0
3	Pengembalian Belanja	-166,057,205	-166,057,205	0
4	Estimasi Pendapatan	13,967,000,000	13,967,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	28,330,998,991	28,330,998,991	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	143,883,693,150	143,883,693,150	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 28-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 675734
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,345,984,000	5,345,984,000	0
2	Belanja	5,079,059,716	5,079,059,716	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	35,182,896	35,182,896	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 411868
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	304,016,340,000	304,016,340,000	0
2	Belanja	291,404,488,211	291,404,488,211	0
3	Pengembalian Belanja	-468,509,173	-468,509,173	0
4	Estimasi Pendapatan	1,758,436,000	1,758,436,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	6,473,003,331	6,473,003,331	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 561178
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,238,170,000	5,238,170,000	0
2	Belanja	4,915,500,064	4,915,500,064	0
3	Pengembalian Belanja	-2,080,000	-2,080,000	0
4	Estimasi Pendapatan	1,242,000	1,242,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	146,713,400	146,713,400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25

